

**DAMPAK PROGRAM JALUR BINA LINGKUNGAN DALAM  
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) PADA SMK SWASTA DI  
KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2016  
(Studi pada SMK Arjuna Bandar Lampung dan SMK Utama Bandar Lampung)**

(Skripsi)

Wiza Yuli Avio Nanda



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2017**

## **ABSTRAK**

### **DAMPAK PROGRAM JALUR BINA LINGKUNGAN DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) PADA SMK SWASTA DI KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2016 (Studi pada SMK Arjuna Bandar Lampung dan SMK Utama Bandar Lampung)**

**Oleh**

**Wiza Yuli Avio Nanda**

Pelaksanaan program jalur bina lingkungan yang dibuat pemerintah daerah Kota Bandar Lampung untuk membantu masyarakat kurang mampu, dan hanya dilaksanakan di sekolah-sekolah negeri di Kota Bandar Lampung. Menimbulkan permasalahan yang menyebabkan sekolah swasta di Kota Bandar Lampung kurang mendapatkan calon peserta didik baru yang diterima masuk di sekolah swasta. Penelitian ini dilakukan di SMK Arjuna Bandar Lampung dan SMK Utama Bandar Lampung. Tujuan penelitian ini menganalisis hasil yang ditimbulkan dari dampak program jalur bina lingkungan dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada SMK swasta di Kota Bandar Lampung tahun 2016. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini terdapat dampak positif dan dampak negatif, untuk dampak positifnya bagi sekolah swasta ialah sistem pembelajaran di kelas berjalan efektif, tim pengajar lebih cepat mengenal karakter siswa di kelas, dan meningkatnya kualitas input peserta didik baru, dan efektifnya jumlah jam mengajar guru khusus di SMK Utama Bandar Lampung. Sedangkan, dampak negatifnya bagi sekolah swasta ialah penurunan jumlah peserta didik yang didapat, berkurangnya anggaran pendapatan dan bantuan yang diterima oleh sekolah, kurang efektifnya jumlah jam mengajar guru honorer maupun guru sertifikasi khusus di SMK Arjuna Bandar Lampung.

Saran penelitian seharusnya pemerintah memberlakukan kebijakan yang sama untuk sekolah swasta terkait pelaksanaan program jalur bina lingkungan, sebaiknya pemerintah memberikan hak jam mengajar bagi guru swasta yang kekurangan jam, dan seharusnya pemerintah memberikan bantuan berupa dana hibah kesekolah swasta, sehingga sekolah swasta dapat memperbaiki kualitas pendidikannya.

**Kata Kunci: Dampak, Program Jalur Bina Lingkungan, Penerimaan Peserta Didik Baru**

## **ABSTRACT**

### **THE IMPACT OF THE ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT PROGRAM IN THE NEW STUDENTS ACCEPTANCE AT PRIVATE VOCATIONAL HIGH SCHOOL (SMK) IN THE CITY OF BANDAR LAMPUNG IN 2016 (A Study at SMK Arjuna Bandar Lampung and SMK Utama Bandar Lampung)**

**By**

**Wiza Yuli Avio Nanda**

The implementation of environmental development program created by the local government of Bandar Lampung for the underprivileged citizens did cause a problem for private schools; it is because the environmental development program only works in public schools and intended for the underprivileged students, causing private schools in the city of Bandar Lampung less new prospective students. This research was conducted at Vocational High School (SMK) Arjuna Bandar Lampung and SMK Utama Bandar Lampung. The purpose of this study is to analyze the impact of environmental development program in the acceptance of new students at private schools in Bandar Lampung in 2016. The method used in this study is a qualitative approach. The data collection techniques were done through observation, interviews, and documentation.

The results and discussions were made related to the positive and negative impact for SMK Arjuna Bandar Lampung and SMK Utama Bandar Lampung; the positive impacts were as follows, the more effective learning process in class, the teachers could recognize students' character more quickly, and the increasing quality of input of new students. However, the negative impact for private schools was the decrease in the number of new students acceptance. As a result, it affected students' spirit and motivation in the classroom learning. It also decreased the number of teaching hours for both honorary and certified teachers, and reduced the schools budget of income and assistance received for the schools.

It is suggested that the government implement similar policies for private schools on environmental development program, in response to the less teaching hours for teachers at private schools, the government should provide teaching hours for them to teach at public schools, and the government should allocate funding to private schools as well, so they can improve the quality of education.

**Keywords:** Impact, Environmental Development Program, New Students Acceptance

**DAMPAK PROGRAM JALUR BINA LINGKUNGAN  
DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)  
PADA SMK SWASTA DI KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2016  
(Studi Pada SMK Arjuna Bandar Lampung dan SMK Utama Bandar Lampung)**

Oleh

**WIZA YULI AVIO NANDA**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

Pada

**Jurusan Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG**

**2017**

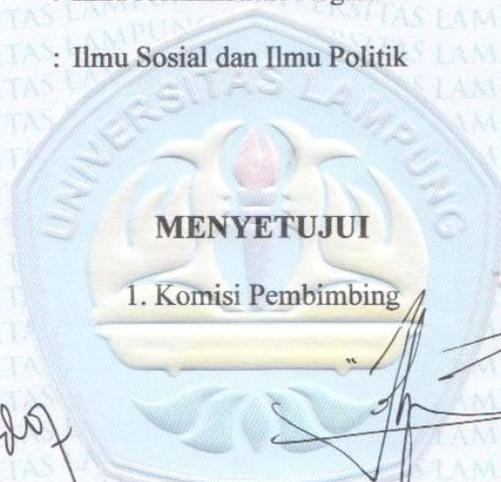
Judul Skripsi : **DAMPAK PROGRAM JALUR BINA LINGKUNGAN DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) PADA SMK SWASTA DI KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2016 (Studi pada SMK Arjuna Bandar Lampung dan SMK Utama Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Wiza Yuli Avio Nanda**

No. Pokok Mahasiswa : 1316041078

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**Eko Budi Sulistio, S.Sos., M.AP.**  
NIP 19780923 200312 1 001

**Izzul Fatchu Reza, S.A.N., M.PA.**  
NIP

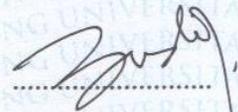
2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara

**Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si.**  
NIP 19750720 200312 1 002

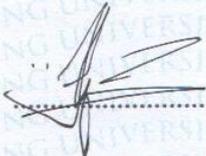
**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

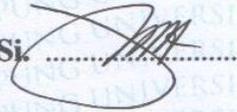
Ketua : **Eko Budi Sulistio, S.Sos., M.AP.**



Sekretaris : **Izzul Fatchu Reza, S.A.N., M.PA.**



Penguji Utama : **Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**Dr. Syarif Makhya**  
NIP. 49590803 198603 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **27 Juli 2017**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi/Laporan akhir ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana/Ahli Madya), baik Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Bandar Lampung, 27 Juli 2017

Yang membuat pernyataan,



Wiza Yuli Avio Nanda  
NPM. 1316041078

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Wiza Yuli Avio Nandadilahirkan di Kota Bandar Lampung pada tanggal 20 Juli 1995. Merupakan anak kedua dari tiga bersaudara pasangan Bapak Wardi Wartan dan Ibu Yusni Efi.

Penulis menempuh pendidikan sekolahnya di mulai dari Taman Kanak-Kanak (TK) AL-AZHAR 2 yang diselesaikan pada tahun 2001, lalu di lanjut ke Sekolah Dasar (SD) SD Negeri 1 Labuhan Ratu lulus pada tahun 2007, kemudian dilanjutkan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) SMP Negeri 23 Bandar Lampung lulus pada tahun 2010, dan dilanjutkan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) SMK Negeri 4 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2013. Kemudian penulis diterima menjadi mahasiswa Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Lampung pada tahun 2013 melalui Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Pengalaman organisasi penulis pada jenjang perguruan tinggi yaitu, sempat aktif di organisasi HIMAGARA (Himpunan Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara), dan penulis tergabung sebagai salah satu anggota Hubungan Luar (HUBLU) HIMAGARA pada tahun 2015. Dengan berorganisasi penulis menjadi lebih banyak belajar mengenai kehidupan di dalam maupun di luar kampus.

## **MOTTO**

**“Jangan katakan pada Allah aku punya masalah, tetapi katakan pada masalah  
aku punya Allah Yang Maha Segalanya.”**

***(Ali Bin Thalib)***

“Mereka berkata bahwa setiap orang membutuhkan tiga hal yang akan membuat mereka berbahagia di dunia ini, yaitu; seseorang untuk dicintai, sesuatu untuk dilakukan, dan sesuatu untuk diharapkan”

(Frederick E. Crane)

**“Sebenarnya Kelemahan-Mu adalah Kekuatan bagi-Mu untuk membuktikan kepada semua orang bahwa diri ini tidak selemah apa yang mereka lihat tentang kamu, dan sebenarnya kamu mampu merancang masa depan kamu untuk lebih baik...”**

***(Wiza Yuli Avio Nanda)***

## **PERSEMBAHAN**

Dengan segala kerendahan hati dan ucapan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan hidayah-Nya, kupersembahkan karya ini untuk :

*Papa dan Mama Ku tercinta*

Terima kasih atas segala kasih sayang, pengorbanan,  
kesabaran, dan do'a untukku

**Segenap keluarga besar dan orang-orang terkasih yang selama ini  
selalu mendukung saya tanpa terkecuali, Seluruh Dosen Ilmu  
Administrasi Negara, Sahabat, Teman-temanku yang senantiasa  
memberikan semangat kepadaku**

**...dan untuk Almamater tercinta,**

**Universitas Lampung**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur kehadiran Allah *Subhana wa Ta'alla* karena atas izin dan ridha-Nya skripsi ini dapat penulis selesaikan. Shalawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad *Shalallah Alaihi Wasallam* juga untuk keluarganya, sahabat-sahabatnay beserta unmatnya hingga akhir zaman. Skripsi ini merupakan hasil penelitian peneliti mengenai Program Jalur Bina Lingkungan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Bandar Lampung, peneliti ini dilakukan untuk mendapatkan gelar Sarjana Administrasi Negara pada jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Lampung . Adapun judul dari skripsi ini adalah “Dampak Program Jalur Bina Lingkungan Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada SMK swasta di Kota Bandar Lampung Tahun 2016 (studi pada SMK Arjuna Bandar Lampung dan SMK Utama Bandar Lampung)

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna karena kesempurnaan hanyalah milik Allah *Azza wa Zalla* dan setiap kesalahan ada pada diri penulis yang merupakan proses pembelajaran penulis untuk menjadi lebih baik lagi dikemudian hari. Akhir kata saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Amin.

**Bandar Lampung, Juli 2017**

**Penulis**

**Wiza Yuli Avio Nanda**  
**NPM. 1316041078**

## SANWACANA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobil'alamin segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "*Dampak Program Jalur Bina Lingkungan Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada SMK Swasta di Kota Bandar Lampung Tahun 2016 (Studi Pada SMK Arjuna Bandar Lampung dan SMK Utama Bandar Lampung)*". penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Selama penyusunan skripsi ini penulis menyadari keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki, sehingga penulis membutuhkan bantuan dari berbagai pihak baik keluarga dosen maupun teman-teman. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Eko Budi Sulistio, S.Sos., M.AP. selaku Dosen Pembimbing yang selalu meluangkan waktu untuk memberikan masukan, arahan dan motivasi dengan sabarnya dalam membimbing penulis penyusun skripsi

ini. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada beliau.

2. Bapak Izzul Fatchu Reza, S.A.N.,M.PA. selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang sama untuk meluangkan waktu memberikan, masukan, arahan, dan motivasi dengan sabarnya dalam membimbing penulis penyusun skripsi ini. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada beliau.
3. Bapak Dr. Dedy Hermawan, S.Sos.,M.Si. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan sekaligus Dosen Pembahas yang begitu baik dan senantiasa memberikan semangat dan masukan yang besar hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada beliau.
4. Dosen-dosen di Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, terimakasih atas segala ilmu yang telah bapak dan ibu berikan. Semoga ilmu dan pengalaman yang telah penulis peroleh selama perjalanan di kampus dapat menjadi bekal yang berharga untuk kehidupan penulis kedepannya, dan semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada beliau sekalian.
5. Terimakasih kepada segenap aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi dan masukan saat penulis melakukan penelitian sehingga membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Bapak Tatang Setiadi, Muhammad Kamal Arifin, Ibu Desmawati, Ibu Lilis Suryani.

6. Terimakasih kepada Yayasan SMK Arjuna Bandar Lampung yang telah meluangkan waktunya dan membantu memberikan informasi saat penulis melakukan penelitian sehingga dapat membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. Ibu Lisna Dewi selaku Kepala Sekolah SMK Arjuna Bandar Lampung, serta guru-guru dan siswa/i di SMK Arjuna Bandar Lampung. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kalian semua.
7. Terimakasih kepada Yayasan SMK Utama Bandar Lampung yang telah meluangkan waktunya dan membantu memberikan informasi saat penulis melakukan penelitian sehingga dapat membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. Bapak H. Dariyo selaku Kepala Sekolah SMK Arjuna Bandar Lampung, serta guru-guru dan siswa/i di SMK Utama Bandar Lampung. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kalian semua.
8. Terimakasih kepada masyarakat Kota Bandar Lampung yang bersedia memberikan opininya demi terselesainya skripsi ini.
9. Terimakasih untuk orang tua ku tercinta, atas segala doa, cinta, kasih sayang, perhatian, dan dukungan. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, ridho dan karunia-Nya. Amin Ya Robbal Alamin.
10. Terimakasih untuk abangku tercinta Hardiansyah Putra dan adikku tersayang Dila Febri Tri Nanda yang selalu menghibur, memberikan semangat dan dukungan selama ini. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kalian semua.

11. Terimakasih untuk adik-adikku tercinta Annisa, Amin, Gita, Dhenny, yang selalu menghibur, memberikan semangat dan dukungan. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kalian semua.
12. Terimakasih untuk sahabatku tercinta Afrilia, Dini, Galuh, Julia, Mentari, Yeni, Zelika, Soleh, Gilang, yang selalu memberikan motivasi, nasehat, dan masukan, serta sahabat dan teman seperguruan dan seperjuangan “Alas Menara” di Jurusan Ilmu Administrasi Negara; Dessy, Vania, Ade, Syntia, Arinta, Bj. Sedy, Ayu Kartika, Nuris, Asti, Isti, Artha, Kessy, Uki, Ghina, Uun, Okke, Septya, Defita, Lela, Fitri, Pepy, Sarah, Kartika Raihana, Iqbal, Ghozie, Pindo, Leo, dan seluruh Ane’013. Semoga kalian semua menjadi orang-orang yang sukses. Amin Ya Robbal Alamin.
13. Sahabat-sahabat Ilmu Administrasi Negara beserta HIMAGARA yang selalu memberikan wawasan dan persahabatan di almamater tercinta ini.
14. Kepada semua orang yang hadir dalam kehidupan penulis dan tidak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih kalian adalah motivator bagi penulis yang akan selalu menjadi kenangan yang terindah dan tetap tersimpan dihati penulis selalu.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb...

Bandar Lampung, Juli 2017  
Penulis,

**Wiza Yuli Avio Nanda**

## DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR GAMBAR.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR SINGKATAN.....	iv
<b>I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Masalah.....	7
D. Manfaat Masalah.....	8
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
A. Dampak Kebijakan Publik.....	9
1. Pengertian Dampak.....	9
2. Pengertian Kebijakan Publik.....	10
3. Proses Kebijakan Publik.....	11
4. Dampak Kebijakan Publik.....	14
B. Aksesibilitas Dalam Kebijakan Publik.....	17
C. Pengertian Pendidikan.....	18
D. Kebijakan Pendidikan.....	19
E. Kewenangan Pendidikan Dalam Otonomi Daerah.....	21
F. Pengertian Penerimaan Peserta Didik Baru.....	24
G. Penerimaan Siswa Baru di Kota Bandar Lampung Melalui Program Jalur Bina Lingkungan.....	26
<b>III. METODE PENELITIAN.....</b>	<b>28</b>
A. Jenis dan Tipe Penelitian.....	28
B. Fokus Penelitian.....	29
C. Lokasi Penelitian.....	30
D. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data.....	31
1. Jenis Data.....	31
2. Teknik Pengumpulan Data.....	32
E. Teknik Analisis Data.....	36
F. Teknik Keabsahan Data.....	37
<b>IV. GAMBARAN UMUM PENELITIAN.....</b>	<b>42</b>
A. Gambaran Kota Bandar Lampung.....	42
1. Kondisi Geografis.....	43

2. Kondisi Pendidikan.....	44
B. Gambaran Singkat Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung.....	45
1. Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung.....	47
2. Tujuan Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung.....	48
3. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung.....	49
C. Gambaran Umum SMK Arjuna Bandar Lampung.....	50
1. Sejarah Singkat SMK Arjuna Bandar Lampung.....	50
2. Visi dan Misi SMK Arjuna Bandar Lampung.....	53
3. Tujuan SMK Arjuna Bandar Lampung.....	54
4. Struktur Organisasi SMK Arjuna Bandar Lampung.....	54
D. Gambaran Umum SMK Utama Bandar Lampung.....	55
1. Sejarah SMK Utama Bandar Lampung.....	55
2. Visi dan Misi SMK Utama Bandar Lampung.....	58
3. Tujuan SMK Utama Bandar Lampung.....	59
4. Struktur Organisasi SMK Utama Bandar Lampung.....	59
<b>V. HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>61</b>
A. Hasil dari Program Jalur Bina Lingkungan terhadap Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada SMK Berstatus Swasta di Kota Bandar Lampung.....	61
1. Dampak Positif yang Dirasakan SMK Arjuna Bandar Lampung dan SMK Utama Bandar Lampung.....	67
a. SMK Arjuna Bandar Lampung.....	67
1) Tim Pengajar Lebih Cepat Mengenal Karakter Siswa/i di Kelas.....	67
2) Sistem Pembelajaran di Kelas Berjalan Efektif.....	69
b. SMK Utama Bandar Lampung.....	70
1) Meningkatnya Kualitas Input SDM Peserta Didik Baru.....	70
2) Sistem Pembelajaran di Kelas Berjalan Efektif.....	74
3) Efektifnya Jumlah Jam Mengajar Guru Honorer dan Guru Sertifikasi.....	76
2. Dampak Negatif yang Dirasakan SMK Arjuna Bandar Lampung dan SMK Utama Bandar Lampung.....	80
a. SMK Arjuna Bandar Lampung.....	80
1) Penurunan Jumlah Peserta Didik Baru.....	80
2) Kurang Efektifnya Jumlah Jam Mengajar Guru Honorer dan Guru Sertifikasi.....	82
3) Berkurangnya Anggaran Pendapatan dan Bantuan Sekolah.....	84
b. SMK Utama Bandar Lampung.....	87
1) Penurunan Jumlah Peserta Didik Baru .....	87
2) Berkurangnya Anggaran Pendapatan dan Bantuan Sekolah.....	89
B. Dampak Program Jalur Bina Lingkungan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada SMK Swasta di Kota Bandar Lampung Studi Pada SMK Arjuna Bandar Lampung dan SMK Utama Bandar Lampung.....	91
C. Hal yang Tidak Terpengaruh Dengan Adanya Program Jalur Bina Lingkungan.....	97
1. Peningkatan Semangat Belajar pada Peserta Didik di Kelas.....	97

<b>VI. KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>100</b>
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran.....	101
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Proses Kebijakan Publik.....	12
Gambar 2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung.....	47
Gambar 3. SMK Arjuna Bandar Lampung.....	51
Gambar 4. SMK Utama Bandar Lampung.....	56
Gambar 5. Kondisi Kedekatan Guru dengan Siswa/i di SMK Arjuna Bandar Lampung.....	68
Gambar 6. Keadaan Peserta Didik di Kelas 10 AP1 di SMK Utama Bandar Lampung.....	73
Gambar 7. Keadaan Peserta Didik Kelas 10 di SMK Arjuna Bandar Lampung.....	81

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Daftar Informan Wawancara.....	32
Tabel 2. Daftar Dokumen yang Berkait Dengan Penelitian.....	35
Tabel 3. Daftar Jumlah Data Satuan Pendidikan (sekolah) di Kota Bandar Lampung tahun 2016.....	45
Tabel 4. Peserta Didik yang Sesuai Tingkatan dan Bidang Keahlian.....	53
Tabel 5. Peserta Didik yang Sesuai Tingkatan dan Bidang Keahlian.....	58
Tabel 6. Data Keseluruhan Jumlah Peserta Didik di SMK Berstatus Negeri dan SMK Berstatus Swasta di Kota Bandar Lampung Tahun 2016.....	63
Tabel 7. Jumlah Guru Yang Mengajar di SMK Utama Bandar Lampung.....	76
Tabel 8. Data Jumlah Peserta Didik Pertahun di SMK Arjuna Bandar Lampung.....	80
Tabel 9. Data Keseluruhan Jumlah Peserta Didik Yang diterima di SMK Arjuna Bandar Lampung Tahun 2016.....	81
Tabel 10. Jumlah Guru Yang Mengajar di SMK Arjuna Bandar Lampung.....	83
Tabel 11. Data Jumlah Peserta Didik di SMK Utama Bandar Lampung.....	87
Tabel 12. Data Keseluruhan Jumlah Peserta Didik Yang Ada di SMK Utama Bandar Lampung Tahun 2016.....	88
Tabel 13. Dampak Program Jalur Bina Lingkungan pada SMK Arjuna Bandar Lampung dan SMK Utama Bandar Lampung.....	94

## **DAFTAR SINGKATAN**

01. BOS (Bantuan Operasional Sekolah)
02. FKKS (Forum Komunikasi Kepala Sekolah Swasta)
03. PPBD (Penerimaan Peserta Didik Baru)
04. RKAS (Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah)
05. Rombel (Rombongan Belajar)
06. SDM (Sumber Daya Manusia)
07. SMK (Sekolah Menengah Kejuruan)
08. UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah)
09. UPY (Unit Pelaksana Yayasan)

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan hak setiap warga negara, itu sebabnya pemerintah sebagai pihak yang memiliki wewenang wajib memenuhi hak-hak warga negara tersebut. Sebagaimana yang telah tertuang dalam UUD 1945 pada pasal 31 ayat 1 sampai 5 yang berisikan bahwa: 1) Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, 2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, 3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang, 4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional, 5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Dalam mencapai bangsa yang bermoral dan sejahtera itu tidaklah mudah diperlukan kualitas pendidikan yang baik dan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang dimiliki. Itu sebabnya, pendidikan sangat penting agar bisa

meningkatkan moral dan kecerdasan bagi penerus bangsa. Pentingnya pendidikan sangat diperlukan untuk mendukung daya saing bangsa. Selain itu, pendidikan juga penting bagi manusia dapat menciptakan manusia yang berkualitas, dan berintelektual. Dalam hal ini, pendidikan secara umum mempunyai arti suatu proses kehidupan dalam mengembangkan diri tiap individu untuk dapat hidup dan menjalankan kehidupannya dengan baik.

Sebagaimana hal tersebut dalam memenuhi tujuan penting pendidikan, maka pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam membuat suatu kebijakan terutama terkait di bidang pendidikan. Untuk itu pemerintah harus membuat suatu program atau sistem yang tepat sasaran sekaligus menjadi kunci utama peningkatan kualitas pendidikan. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang berisikan komponen-komponen pendidikan yang saling terkait dan terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Berdasarkan undang-undang tersebut, maka kebijakan dibuat sebagai upaya nyata dalam peningkatan kualitas pendidikan Indonesia. Meninjau kebijakan di bidang pendidikan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki hak dan kewajiban mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga, pemerintah yang memiliki kewenangan untuk membuat banyak program di bidang pendidikan. Program tersebut dibuat untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya di bidang pendidikan, khususnya masyarakat yang kurang mampu.

Berkaitan dengan permasalahan tersebut, penelitian ini diarahkan di Kota Bandar Lampung dalam hal ini pemerintah daerah khususnya Walikota Bandar Lampung yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Bandar Lampung yang membuat suatu program di bidang pendidikan. Program tersebut di tunjukan bagi masyarakat yang kurang mampu, yang disebut sebagai program jalur bina lingkungan. Dalam menjalankan program tersebut Walikota Bandar Lampung berperan sebagai pembuat kebijakan, dan berpedoman pada peraturan otonomi daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 1 ayat 6 peraturan yang isinya menjelaskan bahwa “otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Hal ini Walikota Bandar Lampung yang membuat suatu program pendidikan gratis guna memenuhi kebutuhan masyarakat ekonomi rendah agar tetap mampu memperoleh pendidikan yang sama, program yang dimaksud adalah program jalur bina lingkungan. Dalam pelaksanaannya, program jalur bina lingkungan memiliki peraturan. Peraturan yang dimaksud adalah syarat dan ketentuan calon siswa yang melalui program jalur bina lingkungan diseleksi berdasarkan kelengkapan berkas, yang mana berkas tersebut menerangkan mengenai keadaan keluarga dan identitas keluarganya. Untuk itu Walikota Bandar Lampung membuat surat keputusan yang isinya tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan nomor surat: 800/1202/IV.40/2016. Disamping itu, penyusunan pedoman ini juga

didasarkan pada peraturan daerah No. 1 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan peraturan Walikota Bandar Lampung No. 49 Tahun 2013 tentang penerimaan peserta didik baru.

Berdasarkan dari data Forum Kepala Sekolah Swasta (FKKS) Bandar Lampung, sebanyak 97 sekolah swasta terancam tutup karena tidak mendapatkan calon siswa. Menurut data yang didapat dari [tribunews.com](http://tribunews.com), ketua FKKS Bandar Lampung Bercah Pitoewas menyebutkan, dari 145 SMA/SMK, baik swasta maupun negeri, hanya 25 sekolah yang dinyatakan tidak terpengaruh oleh adanya Biling. Sekolah tersebut meliputi 17 SMA dan 8 SMK. “Menurut beliau, hal itu merupakan imbas kenaikan kuota Biling yang mencapai 70 persen”. Artinya, masalah ini menjadi dilema bagi sekolah-sekolah swasta yang ada di Bandar Lampung, mengingat hampir 80% siswa lebih memilih di sekolah negeri, dan hanya tinggal 20% yang memilih sekolah swasta. Selain itu, sedikitnya jumlah siswa yang memilih sekolah-sekolah swasta mengakibatkan minimnya anggaran yang masuk kesekolah, sehingga berpengaruh terhadap penghasilan guru honor dan guru sertifikasi yang mengajar disekolah-sekolah swasta di Bandar Lampung tersebut.

Selain itu, jika dilihat dari kebijakan pemerintah yang dilakukan dengan tujuan mulia ternyata tidak selamanya memberikan hasil yang baik, dari permasalahan yang ditimbulkan program jalur bina lingkungan terdapat Peraturan daerah Nomor 01 Tahun 2012 bagian kedua pasal 35 ayat 4 menjelaskan bahwa daya tampung Sekolah Dasar dan yang sederajat, Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan yang sederajat, Sekolah Menengah Atas atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/SMK) dan yang sederajat, 70%

siswa masuk melalui jalur reguler, dan 30% siswa masuk melalui jalur bina lingkungan. Menurut data yang dihimpun oleh lampost.co, sementara yang terjadi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tidaklah demikian, kuota untuk jalur bina lingkungan meningkat menjadi 50% dari 30% yang seharusnya. Setidaknya, ada batasan dalam penerimaan peserta didik baru untuk sekolah negeri sehingga dapat membantu membuka peluang bagi sekolah swasta dalam mendapatkan calon peserta didik baru.

Jika kondisi ini dibiarkan terus menerus tanpa perbaikan dari kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung, dipastikan sekolah swasta di Bandar Lampung pada akhirnya akan tutup. Jangan sampai kebijakan mulia tersebut menimbulkan permasalahan terus menerus karena dalam pelaksanaan tidak memperhitungkan dampak (negatif maupun positif) yang ditimbulkan. Kebijakan program jalur bina lingkungan hendaknya diterapkan bukan hanya berdasarkan hitung-hitungan politik dengan mempertaruhkan kualitas pendidikan, dan program jalur bina lingkungan tidak boleh dilakukan sesuka hati. Seharusnya, tindakan yang dilakukan adalah melakukan pembatasan kuota untuk menjaga kualitas siswa dan merawat kepedulian sekolah swasta di bidang pendidikan, dan melakukan pengawasan serta survei kepada calon siswa yang pendaftar di jalur bina lingkungan yang kurang mampu (miskin), sebab yang ditakutkan adalah adanya siswa yang mampu yang ikut mendaftar di jalur bina lingkungan.

Permasalahan tersebut akan menimbulkan dampak yang dapat mempengaruhi SMK Negeri maupun SMK Swasta khususnya di Kota Bandar Lampung, dari data yang di dapat Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung, ada 60 jumlah

total SMK di Kota Bandar Lampung, yang terdiri dari 9 SMK berstatus Negeri, dan 51 SMK yang berstatus swasta. Dari data jumlah siswa tahun 2016/2017 SMK Kota Bandar Lampung Data Per Juli 2016, catatan total siswa yang masuk dan diterima di SMK Negeri yaitu 12.759 siswa, dan untuk SMK Swasta di Kota Bandar Lampung siswa yang diterima dan masuk yaitu 8.939 siswa. Dari data tersebut peneliti memilih beberapa sampel dari SMK Swasta untuk diteliti dari studi kasus yang ingin diambil oleh peneliti, yaitu SMK Arjuna Bandar Lampung dan SMK Utama Bandar Lampung, karena dampak program jalur bina lingkungan sangat berpengaruh terhadap SMK Swasta dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Bandar Lampung Tahun 2016.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Dampak Program Jalur Bina Lingkungan Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada SMK Swasta di Kota Bandar Lampung Tahun 2016 (Studi Pada SMK Arjuna Bandar Lampung dan SMK Utama Bandar Lampung).”**

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan permasalahan yang ingin diselesaikan melalui penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah hasil Program Jalur Bina Lingkungan terhadap pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada SMK berstatus swasta di Kota Bandar Lampung Tahun 2016?
2. Bagaimanakah dampak Program Jalur Bina Lingkungan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada SMK swasta di Kota Bandar Lampung Tahun 2016 (Studi pada SMK Arjuna Bandar Lampung dan SMK Utama Bandar Lampung)?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui hasil dari program jalur bina lingkungan terhadap pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada SMK berstatus swasta di Kota Bandar Lampung Tahun 2016
2. Untuk mengetahui dampak dari Program Jalur Bina Lingkungan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada SMK swasta di Kota Bandar Lampung Tahun 2016 (Studi pada SMK Arjuna Bandar Lampung dan SMK Utama Bandar Lampung)

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu, secara teoritis dan secara praktis dengan penjelasan sebagai berikut.

1. Secara teoritis atau akademis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan khazanah keilmuan dalam ilmu administrasi negara mengenai dampak kebijakan, yakni dalam hal pelaksanaan penerimaan peserta didik baru melalui program jalur bina lingkungan.
2. Secara praktis, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi para pembaca terutama para pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan di Kota Bandar Lampung. Kebijakan yang dimaksud yaitu, di bidang pendidikan yakni dalam hal pelaksanaan yang adil bagi sekolah, baik negeri maupun swasta berkaitan dengan penerimaan siswa baru.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Dampak Kebijakan Publik**

#### **1. Pengertian Dampak**

Adapun beberapa penjelasan tentang dampak dari para ahli, salah satunya Arif dalam Sinta H. (2015 :5) mengatakan bahwa pengertian dampak adalah segala sesuatu yang ditimbulkan akibat adanya 'sesuatu'. Dampak itu sendiri juga bisa berarti, konsekuensi sebelum dan sesudah adanya 'sesuatu'. Maksudnya adalah keputusan yang dibuat oleh seseorang akan menghasilkan suatu pengaruh (dampak) yang ditimbulkan dari keputusan yang telah dibuatnya, hasilnya didapat tergantung dari bagaimana keputusan itu di jalankan, akankah berdampak ke arah yang positif atau negatif.

Pengertian dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, (2010) adalah benturan, atau pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi. Dampak juga bisa merupakan proses lanjutan dari sebuah

pelaksanaan pengawasan internal. Seorang pemimpin yang handal sudah seleyaknya bisa memprediksi jenis dampak yang akan terjadi atas sebuah keputusan yang akan diambil.

Masih menurut KBBI, dampak itu sendiri dapat dibagi menjadi 2 bagian:

a. Pengertian Dampak Positif

Dampak positif yang dihasilkan adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang baik. Positif juga suasana jiwa yang mengutamakan kegiatan kreatif dari pada kegiatan yang menjemukan, kegembiraan dari pada kesedihan, optimisme dari pada pesimisme.

b. Pengertian Dampak Negatif

Sedangkan, dampak negatif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang buruk dan menimbulkan akibat tertentu.

## **2. Pengertian Kebijakan Publik**

Menurut Abdul Wahab dalam Sulistio (2009: 2) Kebijakan pada umumnya sering dimaksudkan dengan tujuan, program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan, dan rancangan-rancangan besar. Beberapa pengertian tersebut, dapat digunakan untuk membantu memahami makna kebijakan yang sesungguhnya Menurut Abidin dalam Syafaruddin (2008: 76) pengertian kebijakan publik mengandung tiga konotasi, yaitu:

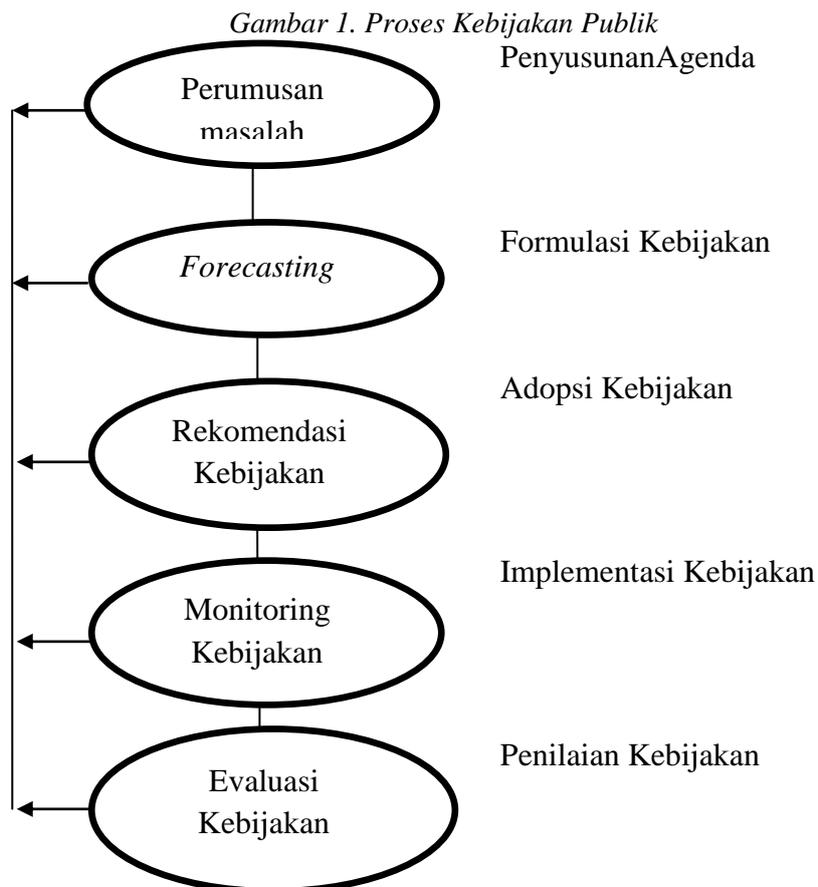
pemerintah, masyarakat, dan umum. Spektrum pemaknaan ini mencakup subjek, objek, dan lingkungan dari kebijakan. Maksudnya adalah kebijakan publik yaitu pemerintah yang dengan kewenangannya dapat memaksa masyarakat untuk mematuhi. Kebijakan publik sebagai apa yang dihasilkan pemerintah dapat merupakan kebijakan umum, kebijakan teknis, dan kebijakan operasional pada tingkat yang paling rendah.

Adapun menurut Irfan Islamy dalam Sulistio (2009: 3), kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian dari suatu keputusan yang diambil dan tindakan yang dilakukan oleh institusi publik dalam hal ini instansi atau badan-badan pemerintah bersama-sama aktor-aktor elit politik dalam rangka menyelesaikan persoalan-persoalan publik demi kepentingan, seluruh masyarakat.

### **3. Proses Kebijakan Publik**

Proses kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politik. Aktivitas politik tersebut nampak dalam serangkaian kegiatan *adapsi* kebijakan implementasi dan penilaian kebijakan. Sedangkan aktivitas perumusan masalah, *forecasting*, rekomendasi kebijakan *monitoring* dan evaluasi kebijakan adalah aktivitas yang lebih bersifat intelektual.

Berikut adalah gambaran yang menunjukkan proses kebijakan publik.



*Sumber: William N. Dunn (2003: 24-25).*

Berdasarkan tahapan tersebut, dijelaskan bahwa tiap-tiap tahapan memiliki karakteristik, karakteristik tersebut, yaitu sebagai berikut.

- a. Perumusan masalah: Memberikan informasi mengenai kondisi yang menimbulkan masalah.
- b. *Forecasting*: Memberikan informasi mengenai konsekuensi alternatif kebijakan, termasuk apabila tidak membuat kebijakan.
- c. Rekomendasi kebijakan: memberikan informasi mengenai manfaat bersih dari setiap alternatif dan merekomendasikan alternatif kebijakan yang memberikan manfaat bersih paling tinggi.

- d. *Monitoring* kebijakan: memberikan informasi mengenai konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan termasuk kedalamnya.
- e. Evaluasi Kebijakan: Memberikan informasi mengenai kinerja atau hasil dari suatu kebijakan.

Adapun pendapat lain yaitu menurut Ripley dalam Subarsono, (2013: 11) ada 4 tahapan dalam proses kebijakan publik, yaitu sebagai berikut.

- 1) Tahapan penyusunan agenda kebijakan, dalam tahap ini ada 3 kegiatan yang perlu dilaksanakan:
  - a. Membangun persepsi dikalangan *steckholder* bahwa sebuah fenomena benar-benar dianggap sebagai masalah.
  - b. Membuat batasan masalah, maksudnya tidak semua masalah harus masuk dalam penyusunan agenda kebijakan dan memiliki tingkat permasalahan yang tinggi (urgensi).
  - c. Memobilisasi dukungan agar masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah.
- 2) Tahapan formulasi dan legitimasi kebijakan, pada tahap ini analisis kebijakan perlu mengumpulkan dan menganalisis informasi yang berhubungan dengan masalah yang bersangkutan, kemudian berusaha mengembangkan alternatif-alternatif kebijakan, membangun dukungan dan melakukan negosiasi, sehingga sampai pada sebuah kebijakan yang dipilih.
- 3) Tahapan implementasi kebijakan, pada tahap ini perlu memperoleh dukungan sumber daya manusia, dan penyusunan organisasi pelaksana

kebijakan. Dalam proses implementasi sering ada insentif dan sanksi agar implementasi kebijakan tersebut berjalan dengan baik.

- 4) Tahapan evaluasi terhadap Implementasi, Kinerja dan Dampak Kebijakan, tindakan implementasi kebijakan akan dihasilkan kinerja dan dampak kebijakan, yang memerlukan proses berikutnya yakni evaluasi. Hasil evaluasi tersebut berguna bagi penentuan kebijakan baru di masa yang akan datang, agar kebijakan yang akan datang lebih baik dan berhasil.

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa proses kebijakan publik terjadi pada saat timbul adanya suatu masalah yang berkembang menjadi sebuah isu publik dan masuk dalam suatu agenda penyusunan untuk diolah dan dibahas dalam mencari *problem solving* (pemecahan masalah) yang kemudian dituangkan dalam kebijakan publik. Terkadang kebijakan tersebut menghasilkan masalah baru sehingga di perlukan evaluasi yang berbasis *learning.Learning* yang dimaksud adalah kegiatan mempelajari ulang dalam membuat suatu kebijakan, mengimplementasikan, dan menghasilkan evaluasi baru.

#### **4. Dampak Kebijakan Publik**

Berdasarkan penjelasan tentang dampak kebijakan publik, menurut Sulistio (2009: 54) mengatakan bahwa dampak kebijakan publik terdiri dari dua hal, yaitu sebagai berikut.

- a. Dampak yang diharapkan (*intended impact*) yakni, kebijakan publik itu bermanfaat dan dilaksanakan oleh anggota-anggota masyarakat.
- b. Dampak yang tidak diharapkan.

Dalam hal ini penyebab tidak tercapainya dampak yang diinginkan, yaitu ;

- a. Sumber-sumber yang tidak memadai
- b. Cara yang digunakan untuk melaksanakan kebijakan
- c. Banyaknya penyebab dari suatu masalah publik
- d. Kepatuhan terhadap kebijakan
- e. Tujuan-tujuan saling bertentangan antara kebijakan yang satu dengan yang lain
- f. Dana yang dikeluarkan untuk melaksanakan kebijakan tidak memadai
- g. Banyak masalah publik yang tidak diselesaikan
- h. Masalah kebijakan yang selalu berubah (dinamis)
- i. Pengalihan terhadap pelaksanaan suatu kebijakan kepada kebijakan lain.

Adapun metode penilaian mengenai dampak kebijakan, yakni:

- a. Penggunaan kelompok pengawasan untuk penafsiran dampak-dampak pembaruan (*Use of control group to estimate confounding effects*).
  - 1) Pendekatan optimal yakni percobaan secara *random* atau percobaan sebenarnya (*the optimum approach : randomized or "true" experience*).
  - 2) Percobaan nonrandom dengan pengawasan dibentuk (*non-randomized experiment with constructed controls*).
  - 3) Percobaan nonrandom dengan pengawasan refleksif (*non-randomized experiment with reflexive controls*).
- b. Penggunaan penyesuaian statistik (*use of statistical adjustment*)
- c. Kombinasi dari kelompok pengawasan dan kelompok statistik (*combinations of control groups and statistical control*).

d. Metode kira-kira (*approximate methods*).

Adapun pendapat lain mengenai dampak kebijakan publik, menurut Rossi dan Freeman dalam Persons (2005: 604) mengatakan bahwa penilaian atas dampak adalah untuk memperkirakan apakah intervensi menghasilkan efek yang diharapkan atau tidak. Tujuan dasar dari penilaian dampak adalah untuk memperkirakan “efek bersih” dari sebuah intervensi yakni, perkiraan dampak intervensi yang tidak dicampuri oleh pengaruh dari proses dan kejadian lain yang mungkin juga mempengaruhi perilaku atau kondisi yang menjadi sasaran suatu program yang sedang dievaluasi.

Penilaian dampak dapat dilakukan dengan menggunakan metode, yaitu:

- a. Membandingkan problem, situasi, atau kondisi dengan apa yang terjadi sebelum intervensi.
- b. Melakukan eksperimen untuk menguji dampak suatu program terhadap suatu area atau kelompok dengan membandingkan apa yang terjadi di area atau kelompok lain yang belum menjadi sasaran intervensi.
- c. Membandingkan biaya dan manfaat yang di capai sebagai hasil dari intervensi.
- d. Menggunakan model untuk memahami dan menjelaskan apa yang terjadi sebagai akibat dari kebijakan masa lalu.
- e. Pendekatan kualitatif dan *judgemental* untuk mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan kebijakan dan program.
- f. Membandingkan apa yang sudah terjadi dengan tujuan atau sasaran tertentu dari sebuah program atau kebijakan.

g. Menggunakan pengukuran kinerja untuk menilai apakah tujuan atau targetnya sudah terpenuhi.

Dapat disimpulkan bahwa dampak kebijakan publik akan timbul dalam sebuah kebijakan pemerintah yang tentu mengundang banyak sisi, banyak aspek, atau banyak sudut pandang. Selain itu, kebijakan itu pasti ada yang membuatnya, dan kebijakan pemerintah itu dibuat dan diterbitkan oleh sebuah lembaga atau pejabat pemerintah. Apabila dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah yang baik akan menentukan tercapainya tujuan kebijakan artinya menghasilkan dampak positif yang diharapkan dan dapat menghindari dampak negatif yang tidak diharapkan. Sebaliknya, jika pelaksanaan kebijakan itu kurang baik akan menimbulkan dampak negatif yang akan mengecewakan dan merugikan rakyat. Umumnya dampak negatif ini merupakan dampak sampingan yang kurang atau tidak di perhitungkan sebelumnya.

## **B. Aksesibilitas Dalam Kebijakan Publik**

Aksesibilitas dalam Pratiknya (2007: 61) mengatakan bahwa *accessibility* adalah hal yang mudah dicapai. Artinya aksesibilitas tidak hanya sekedar kesediaan segala sesuatu, namun juga kesediaan yang mudah dicapai. Aksesibilitas dalam dunia pendidikan itu sendiri dapat dikatakan kemudahan bagi kemampuan seseorang untuk dapat mengakses pendidikan menuju suatu tempat pendidikan (sekolah). Selain itu, menurut Irfan Islamy, dalam Sulistio, (2009: 3) dijelaskan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak

dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat.

Berdasarkan penjelasan mengenai aksesibilitas dan kebijakan publik, memiliki hubungan di antara keduanya, aksesibilitas adalah hal yang mudah di capai, dalam hal ini kebijakan publik yang merupakan tindakan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah dalam menangani persoalan-persoalan seluruh masyarakat, demi kepentingan masyarakat, membuat suatu program di bidang pendidikan khusus di Kota Bandar Lampung, bertujuan untuk memudahkan masyarakat miskin untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Jadi aksesibilitas dalam kebijakan publik yaitu jalan pencapaian atau kemudahan dalam menjalankan suatu program dibidang pendidikan yang dibuat oleh aktor-aktor pembuat kebijakan dalam rangka mencapai suatu tujuan untuk kepentingan seluruh masyarakat khususnya masyarakat kurang mampu (miskin). Dalam menempuh pendidikan yang layak.

### **C. Pengertian Pendidikan**

Pengertian pendidikan menurut Syahrizal dan Sugiarto (2013: 5) dalam arti luas menjelaskan bahwa pendidikan adalah suatu upaya yang dilakukan untuk mentransformasikan pengetahuan dan nilai-nilai sosial, pembentukan karakter, dan watak, serta mengajarkan keterampilan dan daya cipta, sehingga manusia dapat menjalani hidup dengan baik. Adapun dua makna yang mengartikan pendidikan, yaitu makna luas dan makna sempit. Jika memaknai pendidikan secara luas, maka pendidikan merupakan sebuah

proses yang dilakukan sejak seorang bayi masih dalam kandungan, itu dilahirkan dan berlangsung seumur hidup. Sedangkan pendidikan dalam arti sempit adalah belajar di sekolah atau insitusi pendidikan.

Selain itu, Pendidikan menurut John Dewey dalam Syahrizal dan Sugiarto, (2013: 4) adalah proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional kearah alam dan sesama manusia. Adapun pendapat lain menurut J.J. Rousseau dalam Syahrizal dan Sugiarto (2013: 4) pendidikan adalah memberikan kita pembekalan yang ada pada masa kanak-kanak sampai remaja yang nantinya akan dibutuhkan pada saat kita dewasa nantinya.

Jadi, pendidikan merupakan salah satu kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia, karena pendidikan merupakan salah satu alat mobilitas vertikal yang paling penting, ketika modal yang lain tidak dimiliki, maksudnya modal berupa uang atau barang, hanya modal pendidikan yang dapat berkompetisi untuk mendapatkan kesempatan memperoleh penghidupan yang lebih baik di masa depan.

#### **D. Kebijakan Pendidikan**

Kebijakan pendidikan menurut Slamet P.H. dalam Prihatin (2011: 18) menjelaskan bahwa kebijakan pendidikan adalah apa yang dikatakan (diputuskan) dan dilakukan oleh pemerintah dalam bidang pendidikan dengan demikian, kebijakan pendidikan berisi keputusan dan tindakan yang mengalokasikan nilai-nilai. Adapun Kebijakan pendidikan menurut Prihatin (2011: 20) kebijakan pendidikan adalah upaya perbaikan dalam tataran

konsep pendidikan, perundang-undangan, peraturan dan pelaksanaan pendidikan serta menghilangkan praktik-praktik pendidikan di masa lalu yang tidak sesuai atau kurang baik sehingga segala aspek pendidikan di masa mendatang menjadi lebih baik. Kebijakan publik memiliki karakteristik yang khusus, yakni:

1. Memiliki tujuan pendidikan, maksudnya dengan memiliki tujuan pendidikan yang jelas dan terarah dapat memberikan kontribusi pada pendidikan.
2. Memenuhi aspek *legal-formal*, maka perlu adanya pemenuhan atas prasyarat yang harus dipenuhi agar kebijakan pendidikan itu diakui dan secara sah berlaku untuk sebuah wilayah.
3. Memiliki konsep operasional, kebijakan pendidikan sebagai sebuah panduan yang bersifat umum tentunya harus mempunyai manfaat operasional agar dapat di implementasikan dan ini adalah sebuah keharusan untuk memperjelas pencapaian tujuan pendidikan yang ingin dicapai.
4. Dibuat oleh yang berwenang, kebijakan pendidikan itu harus di buat oleh para ahli di bidang yang memiliki kewenangan, sehingga tidak sampai menimbulkan kerusakan pada pendidikan dan lingkungan di luar pendidikan, seperti para administrator pendidikan, pengelola lembaga pendidikan dan para politisi yang berkaitan langsung dengan pendidikan adalah unsur minimal pembuat kebijakan pendidikan.
5. Dapat di evaluasi, kebijakan pendidikan tentunya tidak terhindar dari keadaan sesungguhnya untuk ditindaklanjuti. Karena dalam membuat

suatu kebijakan pasti ada yang ditimbulkan dan untuk itu diperlukan evaluasi dan sebuah kebijakan.

6. Memiliki sistematika, kebijakan pendidikan tentunya merupakan sebuah sistem, oleh karena itu harus memiliki sistematika yang jelas menyangkut seluruh aspek yang ingin diatur kebijakan pendidikan tersebut.

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya kebijakan dalam pendidikan merupakan pedoman dan petunjuk bagi pelaksana pendidikan dalam menjalankan kegiatan pendidikan, oleh sebab itu kebijakan yang dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah khususnya dalam bidang pendidikan pasti mempunyai dasar yang kuat untuk meningkatkan pendidikan tersebut, dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan dalam kebutuhan masyarakat yang diinginkan. Maka peran kebijakan pendidikan sangat penting di dalam melindungi dan memberikan pengawasan terhadap kegiatan pendidikan agar dapat berjalan sesuai dengan rencana untuk mencapai tujuan seperti yang diharapkan.

#### **E. Kewenangan Pendidikan Dalam Otonomi Daerah**

Berdasarkan Peraturan pemerintah tentang otonomi daerah, tertuang dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 1 ayat (5) dikemukakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah Otonom di sini dimaksudkan adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang

berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain itu dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom, dan dalam Pasal 2 butir (3) kewenangan sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat 2 dikelompokkan dalam bidang-bidangnya, dan untuk urusan di bidang pendidikan dan kebudayaan dimaksudkan kedalam kelompok nomor 11 yang berisi tentang :

1. Penetapan standar kompetensi siswa dan warga belajar serta pengaturan kurikulum nasional dan penilaian hasil belajar secara nasional serta pedoman pelaksanaannya.
2. Penetapan standar materi pelajaran.
3. Penetapan persyaratan perolehan dan pengguna gelar akademik.
4. Penetapan pedoman pembiayaan penyelenggaraan pendidikan.
5. Penetapan persyaratan penerimaan, perpindahan, sertifikasi siswa, warga belajar dan mahasiswa.
6. Penetapan persyaratan peningkatan/*zoning*, pencarian, pemanfaatan, pemindahan, penggandaan, sistem pengamanan dan kepemilikan benda cagar budaya, serta persyaratan penelitian arkeologi.
7. Pemanfaatan hasil penelitian arkeologi nasional serta pengelolaan museum nasional, galeri nasional, pemanfaatan naskah sumber arsip, dan monumen yang diakui secara internasional.

8. Penetapan kalender pendidikan dan jumlah jam belajar efektif setiap tahun bagi pendidikan dasar, menengah, dan luar sekolah.
9. Pengaturan dan pengembangan pendidikan tinggi, pendidikan jarak jauh serta pengaturan sekolah internasional.
10. Pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra Indonesia.

Dapat dikatakan bahwa kewenangan pendidikan tersebut sudah diatur dalam peraturan pemerintah daerahnya masing-masing. Hak lembaga pendidikan untuk menjalankan tugasnya di wilayah masing-masing. Selain itu, Kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu adalah wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan. Sedangkan, Hakikat pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam MS. Nuh (2012: 52) menjelaskan bahwa pada hakikatnya otonomi daerah adalah (1) hak mengurus rumah tangga sendiri bagi suatu daerah otonom; (2) dalam kebebasan menjalankan hak mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri, daerah tidak dapat menjalankan hak dan wewenang otonominya itu di luar batas-batas wilayah daerahnya; (3) daerah tidak boleh mencampuri hak mengatur dan mengurus rumah tangga daerah lain sesuai dengan wewenang pangkal dan urusan yang diserahkan kepadanya; dan (4) otonomi tidak membawahi otonomi daerah lain, hak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri tidak merupakan subkordinasi hak mengatur dan mengurus rumah tangga daerah lain. Pada dasarnya pemerintah pusat hanya berperan sebagai fasilitator, dan sebagai pengawas. Sedangkan otonomi pengelolaan pendidikan berada pada tingkat sekolah, oleh karena itu dalam

pengelolaannya dan kewenangannya diserahkan kepada lembaga pendidikan.

#### **F. Pengertian Penerimaan Peserta Didik Baru**

Penerimaan peserta didik baru (PPDB) merupakan gerbang awal yang harus dilalui oleh peserta didik dan sekolah di dalam penyaringan objek-objek pendidikan, bagi sekolah peristiwa ini merupakan titik awal yang menentukan kelancaran tugas suatu sekolah. Kesalahan dalam penerimaan siswa baru dapat menentukan sukses tidaknya usaha pendidikan di sekolah yang bersangkutan. Dengan melihat definisi perkata dari istilah Penerimaan Siswa Baru menurut Anwar dalam Enny Rohmatin (2015: 7), dapat disimpulkan bahwa arti dari penerimaan peserta didik baru (PPDB) adalah suatu proses masuknya data siswa baru seorang pelajar yang akan sekolah atau daftar ke sekolah dengan tujuan untuk menjadi salah satu bagian dari sekolah tersebut.

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Bandar Lampung merujuk pada keputusan Walikota Bandar Lampung No. 49 tahun 2013 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Bab II Ketentuan Umum pasal 1 butir (2) Penerimaan peserta didik baru adalah penerimaan peserta didik pada pendidikan anak usia dini dan sekolah yang dilaksanakan pada awal tahun pelajaran baru, dan di Bab III Tujuan dan asas penerimaan peserta didik baru Pasal 2 Tujuan, yaitu:

- a. Memberikan kesempatan kepada warga Negara Republik Indonesia khususnya anak-anak usia sekolah masyarakat kota Bandar Lampung

untuk memperoleh tempat layanan pendidikan yang berkualitas pada satuan pendidikan yang lebih tinggi.

- b. Terwujudnya suasana aman, lancar, dan objektif dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru tahun 2015/2016.
- c. Terlaksananya penerimaan peserta didik baru sesuai dengan kemampuan daya tampung sekolah yang tersedia.
- d. Terlaksananya sistem seleksi penerimaan peserta didik baru dengan ketentuan dan aturan yang ada, sehingga dapat di peroleh peserta didik baru yang benar-benar berkualitas sesuai dengan kriteria yang diharapkan.

Masih di BAB III mengenai tujuan dan asas penerimaan peserta didik baru pada Pasal 3 tentang Asas, yaitu:

- a. Objektif, artinya bahwa penerimaan peserta didik baru harus memenuhi ketentuan umum yang diatur dalam pedoman ini.
- b. Transparansi, artinya pelaksanaan PPDB ini bersifat Terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik, untuk menghindarkan penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi.
- c. Akuntabilitas, artinya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) ini dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya.
- d. Tidak diskriminatif, artinya proses penerimaan peserta didik baru ini diikuti oleh segenap warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memenuhi syarat, tanpa membedakan suku, daerah asal, agama dan golongan, serta status sosial.

### **G. Penerimaan Siswa Baru di Kota Bandar Lampung Melalui Program Jalur Bina Lingkungan**

Dalam pelaksanaan program jalur bina lingkungan terdapat pedoman yang mana disusun berdasarkan Peraturan Daerah No. 01 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan pendidikan dan Peraturan Walikota Bandar Lampung dan No. 49 Tahun 2013 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada jenjang pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kota Bandar Lampung, jika dilihat pada Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Bab VI tentang jalur sistem seleksi penerimaan peserta didik baru pasal 10 butir ke (1) jalur bina lingkungan, di peruntukkan bagi:

- a. Calon siswa baru dari keluarga belum mampu secara ekonomi yang berdomisili dekat dengan sekolah pilihan, dan resmi sebagai warga Kota Bandar Lampung, dengan ketentuan :
  1. Memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus PPDB yang telah ditetapkan.
  2. Memiliki dan menyerahkan *fotocopy* kartu Jamkesmas dan Jamkesda yang sah.
  3. Memiliki surat keterangan tidak mampu dari lurah dan di lampirkan surat keterangan RT setempat serta dari kepala sekolah asal.
  4. Menyerahkan *fotocopy* kartu keluarga dan KTP orang tuanya.
  5. Menyerahkan kartu keluarga yang asli, dan akan dikembalikan pada saat pengumuman.

6. Hanya diperkenankan memilih satu sekolah yang terdekat dengan tempat tinggalnya.
- b. Anak kandung pendidik dan tenaga kependidikan pada sekolah yang bersangkutan, dengan ketentuan:
    1. Menyerahkan *fotocopy* KTP, kartu keluarga atau KP4.
    2. Menyerahkan *fotocopy* surat tugas dari satuan pendidikan tempat bertugas.
    3. Memenuhi persyaratan umum/khusus PPDB tahun 2016/2017 yang telah ditetapkan
    4. Dapat memilih sekolah tempat orang tuanya bertugas, atau sekolah lain yang terdekat dengan tempat tinggal orang tuanya.
  - c. Jika persyaratan yang dimaksud pada huruf a dan b diatas terpenuhi, maka dapat diterima di SMP/SMA/SMK Negeri yang terdekat dengan tempat tinggalnya tanpa mengikuti proses seleksi, atau ditempat orang tuanya bekerja untuk poin (b) sekalipun jauh dari tempat tinggalnya.
  - d. Setelah ditetapkan, maka akan diadakan seleksi berdasarkan hasil verifikasi biodata (*home visit*) yang dilakukan oleh panitia sekolah.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah tipe penelitian deskriptif (menggambarkan) dengan pendekatan kualitatif. Menurut Nazir (2009: 55), tipe penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian, hal tersebut didasarkan karena penelitian ini menghasilkan data-data berupa kata-kata menurut responden, apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitiannya, kemudian dianalisis pula dengan kata-kata yang melatarbelakangi responden untuk (berperilaku, berpikir, berperasaan, dan bertindak), direduksi, ditriangulasi, disimpulkan (diberi makna oleh peneliti), dan diverifikasi. Adapun tujuannya adalah untuk menggambarkan secara tepat mengenai suatu keadaan, sifat-sifat individu atau gejala yang terjadi terhadap kelompok tertentu.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang menekankan proses penelitian daripada hasil penelitian. Dengan demikian, bukan kebenaran mutlak yang dicari tetapi pemahaman menyeluruh dan mendalam mengenai dampak program jalur bina lingkungan dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada SMK swasta di Kota Bandar Lampung tahun 2016 (studi pada SMK Arjuna Bandar Lampung dan SMK Utama Bandar

Lampung) melalui proses wawancara kepada aktor-aktor yang terkait serta data-data yang diperoleh.

## **B. Fokus Penelitian**

Dalam penelitian kualitatif hal yang harus di perhatikan adalah masalah dan fokus penelitian. Fokus memberikan batasan dalam studi dan batasan dalam pengumpulan data sehingga dengan batasan ini peneliti akan fokus memahami masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian. Karena itu menurut Sugiyono (2013: 287) fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif, menetapkan penelitiannya secara keseluruhan situasi sosial dan diteliti meliputi aspek tempat (*place*), pelaku (aktor), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis.

Untuk memahami secara lebih luas dan mendalam, maka diperlukan pemilihan fokus penelitian. Sedangkan, untuk masalah dalam penelitian kualitatif yang disebut dengan fokus itu sendiri, berisi tentang pokok masalah yang masih bersifat umum.

Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan masalah penelitian mengenai:

1. Hasil dari program jalur bina lingkungan terhadap pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada SMK Swasta di Kota Bandar Lampung, yang hasilnya menunjukkan bagi sekolah-sekolah swasta khususnya SMK, menunjukkan beberapa dari data SMK yang berstatus swasta di Kota Bandar Lampung terancam akanditutup.
2. Menganalisis dampak program jalur bina lingkungan dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada SMK Swasta di Kota Bandar

Lampung(studi pada SMK Arjuna Bandar Lampung dan SMK Utama Bandar Lampung), dilihat dari dampak positif dan dampak negatif yang ada pada SMK Arjuna Bandar Lampung dan SMK Utama Bandar Lampung.

### **C. Lokasi Penelitian**

Dalam menentukan lokasi penelitian menurut Subagyo (2006:34), mengatakan bahwa lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap masalah atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Yang dimaksud dengan lokasi atau objek penelitian yang sesuai dengan objek permasalahannya dan merupakan daerah informasi secara kualitatif. Dengan melihat sasaran yang ada perlu adanya pertimbangan dalam menentukan lokasi penelitian seperti, keterbatasan waktu, dan biaya serta tenaga. Maka lokasi penelitian dalam penelitian ini ditentukan dengan sengaja (purposive) yang akan dilakukan di Kota Bandar Lampung.

Dari beberapa alasan yang menjadi dasar pemilihan lokasi penelitian ini adalah Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung sebagai pengawas dan yang membuat peraturan tata tertib jalannya program jalur bina lingkungan di sekolah-sekolah negeri, sementara untuk studi kasusnya SMK Arjuna Bandar Lampung dan SMK Utama Bandar Lampung yang merupakan dua sekolah swasta dari sekian sekolah swasta di Kota Bandar Lampung yang terkena dampak dari program jalur bina lingkungan.

## **D. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data**

### **1. Jenis Data**

Menurut Sugiyono (2013: 308) dalam mengumpulkan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.

Dengan demikian, jenis data yang akan digunakan peneliti dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut.

#### **a. Data Primer**

Data Primer dalam penelitian ini diperoleh dari lokasi penelitian, melalui pengamatan langsung. Data diperoleh dengan cara melakukan wawancara kepada informan mengenai dampak program jalur bina lingkungan dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada SMK swasta di Kota Bandar Lampung Tahun 2016 pada SMK Arjuna Bandar Lampung dan SMK Utama Bandar Lampung.

#### **b. Data Sekunder**

Data Sekunder diperlukan untuk melengkapi informasi yang diperoleh sumber data primer. Data sekunder dapat berupa naskah, dokumen resmi, literatur, artikel, koran, dan sebagainya yang berkenaan dengan dampak program jalur bina lingkungan dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada SMK swasta di Kota Bandar Lampung Tahun 2016 (studi pada SMK Arjuna Bandar Lampung dan SMK Utama Bandar Lampung).

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2013: 309) untuk melakukan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

### a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur dan penentuan informan ditentukan secara purposive dimana peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap dengan pengumpulan datanya. Informan yang diwawancarai adalah aktor-aktor yang terlibat dalam permasalahan berkaitan dengan dampak program jalur bina lingkungan dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada SMK swasta di Kota Bandar Lampung Tahun 2016 (Studi pada SMK Arjuna Bandar Lampung dan SMK Utama Bandar Lampung), yakni:

Tabel 1. Daftar Informan Wawancara

No.	Informan	Informasi	Tanggal Wawancara
1	Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung	Untuk mendapatkan informasi tentang program jalur bina lingkungan yang berjalan di sekolah-sekolah negeri	17 Februari 2017
2	Staff Seksi SMK Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung	Untuk mendapatkan informasi dampak yang ditimbulkan dari program jalur bina lingkungan, dan mendapatkan gambaran lokasi khususnya studi kasus SMK swasta yang ingin diteliti.	30 September 2016

3	Kepala Sekolah SMK Arjuna Bandar Lampung	Mendapatkan informasi berkaitan tentang dampak yang ditimbulkan dari program jalur bina lingkungan terhadap SMK Arjuna Bandar Lampung	19 Oktober 2016 Dan 21 April 2017
4	Kepala Sekolah SMK Utama Bandar Lampung	Mendapatkan informasi dan mengkonfirmasi kembali berkaitan tentang dampak yang ditimbulkan dari program jalur bina lingkungan terhadap SMK Arjuna Bandar Lampung	20 Oktober 2016
5	Guru di SMK Utama Bandar Lampung	Untuk memperoleh tanggapan mengenai program jalur bina lingkungan yang dilaksanakan di sekolah negeri dan berdampak pada sistem mengajar di SMK Utama Bandar Lampung	20 April 2017
6	Wakil Kesiswaan SMK Utama Bandar Lampung	Mengkonfirmasi kembali tentang pengaruh dampak program jalur bina lingkungan terhadap SMK Utama Bandar Lampung	20 April 2017
7	Siswa/i SMK Utama Bandar Lampung	Menanggapi dampak terhadap program jalur bina lingkungan.	20 April 2017
8	Guru di SMK Arjuna Bandar Lampung	Untuk memperoleh tanggapan mengenai program jalur bina lingkungan yang dilaksanakan di sekolah negeri dan berdampak pada sistem mengajar di SMK Utama Bandar Lampung	20 Oktober 2016 21 April 2017
9	Siswa/i di SMK Arjuna Bandar Lampung	Menanggapi dampak terhadap program jalur bina lingkungan	17 April 2017

Sumber :Diolah peneliti Tahun 2017

#### b. Observasi

Menurut Nazir (2009: 175) mengatakan bahwa observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan. Observasi yang disebut sebagai pengamatan adalah kegiatan manusia dengan menggunakan pancaindera seperti mata sebagai alat bantu utamanya. Oleh karena itu, observasi merupakan kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya

melalui hasil kerja pancaindera mata serta dibantu dengan pancaindera lainnya.

Pada penelitian ini peneliti melakukan observasi dengan mendeskripsikan hasil dan dampak program jalur bina lingkungan terhadap pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada SMK swasta di Kota Bandar Lampung, studi pada SMK Arjuna Bandar Lampung dan SMK Utama Bandar Lampung.

Beberapa observasi yang akan dilakukan oleh peneliti, antara lain, yaitu:

- 1) Melakukan pengamatan terhadap kondisi fisik SMK swasta khususnya SMK Arjuna Bandar Lampung dan SMK Utama Bandar Lampung.
- 2) Melakukan pengamatan kepada peserta didik kelas 10 yang diterima pada tahun 2016 di SMK Arjuna Bandar Lampung dan SMK Utama Bandar Lampung.
- 3) Melakukan pengamatan terhadap kedekatan peserta didik dan guru-guru dalam proses kegiatan belajar di kelas.
- 4) Melakukan pengamatan dengan membandingkan penerimaan peserta didik yang diterima di SMK yang berstatus negeri di Kota Bandar Lampung dengan SMK Arjuna Bandar Lampung dan SMK Utama Bandar Lampung.
- 5) Melakukan pengamatan terhadap sarana dan prasarana yang ada di SMK Arjuna Bandar Lampung.

## c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa, menggunakan dokumentasi maka hasil observasi dan wawancara akan lebih akurat karena dokumentasi didukung dengan berisikan catatan yang sudah dilakukan, atau bisa berupa foto, tulisan (berbentuk dokumen, surat-surat, laporan), gambar, karya dan sebagainya. Adapun dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain yaitu:

Tabel 2. Daftar Dokumen yang Berkait Dengan Penelitian

No.	Dokumen	Substansi
1.	Peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 04/VI/PB/2011 Pada Taman Kanak-Kanak/ Raudhatul Athfal/ Bistanul Athfal dan Sekolah/ Madrasah.	Dokumen yang berkaitan tentang peraturan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di Kota Bandar Lampung
2.	Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.	Dokumen yang berkaitan mengenai kewenangan Walikota Bandar Lampung dalam penyelenggaraan pendidikan
3.	Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 49 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (Paud), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kota Bandar Lampung.	Dokumen yang berkaitan tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Bandar Lampung Tahun 2016
4.	Petunjuk Teknis Nomor 800/1202/IV.40/2016 Tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK Kota Bandar Lampung	Dokumen mengenai kewenangan Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung sebagai tim pengawas dalam Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2016
5.	Data Jumlah Siswa Tahun Pelajaran 2016/2017 SMK Kota Bandar Lampung Data Per Juli 2016	Data Jumlah Keseluruhan Siswa yang diterima di SMK Negeri dan SMK swasta
6.	Data Jumlah Siswa Bina Lingkungan yang diterima di Kota Bandar Lampung Tahun 2016	Dokumen mengenai jumlah siswa yang diterima melalui Program Jalur Bina Lingkungan di sekolah-sekolah Negeri.

Sumber: Diolah oleh peneliti Tahun 2017

## **E. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2013: 334-343), teknis analisis data tersebut meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

### **1. Reduksi Data**

Data yang diperoleh dilokasi penelitian dituangkan dalam uraian laporan yang lengkap dan terperinci. Dalam bentuk analisa yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Dalam penelitian ini data yang diperoleh dipilih dan dirangkum untuk disesuaikan dengan fokus penelitian tentang hasil dari program jalur bina lingkungan dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada SMK swasta di Kota Bandar Lampung studi pada SMK Arjuna Bandar Lampung dan SMK Utama Bandar Lampung dan mengidentifikasi dampak program jalur bina lingkungan dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada SMK swasta di Kota Bandar Lampung studi pada SMK Arjuna Bandar Lampung dan SMK Utama Bandar Lampung.

### **2. Penyajian Data**

Teknik ini untuk memudahkan peneliti melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Batasan yang diberikan dalam penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan

tindakan. Diwujudkan dalam bentuk uraian dengan teks naratif, tabel, serta foto gambar.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Melakukan verifikasi secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung. Yaitu sejak awal memasuki lokasi penelitian dan selama proses pengumpulan data. Peneliti menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, yang dituangkan dalam kesimpulan.

## **F. Teknik Keabsahan Data**

Keabsahan data merupakan standar validitas dari data yang diperoleh. Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian. Menurut Sugiyono (2013: 383) Untuk menetapkan keabsahan data (Trustworthiness) data diperlukan dengan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Moleong (2012: 326) menyebutkan ada empat kriteria yang digunakan:

#### 1. Derajat kepercayaan

Kriteria ini berfungsi untuk melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai dan untuk mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan

pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti. Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh peneliti untuk memeriksa kredibilitas atau derajat kepercayaan antara lain:

a. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Menurut Denzim dalam Moleong, (2012: 330) membedakan macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, atau teori.

Menurut Patton dalam Moleong (2012: 330-331) menjelaskan Triangulasi dengan Sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Seperti mengumpulkan sumber data dari kelompok, lokasi atau latar, atau waktu yang berbeda beda.

Triangulasi dengan Metode yang terdapat dua strategi, yaitu :

(1) pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data

(2) pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama. Maksudnya, yaitu jika penulis menggunakan dua metode atau lebih untuk riset yang sama.

Triangulasi dengan Teori, berdasarkan anggapan bahwa fakta tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori.

Maksudnya, yaitu jika penulis menggunakan beberapa kemungkinan menafsiran teoritis.

Dalam penelitian ini, triangulasi yang di paparkan oleh penulis yaitu dengan mendeskripsikan hasil dari penelitian di lapangan, karena penulis berusaha menyatukan perbedaan sumber data yang di temukan melalui beberapa sumber dengan melakukan wawancara ke beberapa informan, yakni pihak Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung sebagai tim pengawas dan yang membuat peraturan sekaligus tata tertib untuk petunjuk teknis pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) melalui jalur bina lingkungan, dan sekolah swasta yang terkena pengaruh dari program tersebut yaitu studi pada SMK Arjuna Bandar Lampung dan SMK Utama Bandar Lampung.

#### b. Kecukupan Referensial

Mengumpulkan bahan-bahan tercatat, atau rekaman-rekaman yang dapat digunakan sebagai referensi dan patokan untuk menguji sewaktu diadakan analisis dan penafsiran data. Misalnya, rekaman, catatan, dan foto yang dapat dimanfaatkan untuk membandingkan hasil yang diperoleh dengan kritik yang terkumpul.

## 2. Keteralihan

Agar orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif dan ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. Upaya untuk memenuhi hal ini peneliti

melakukannya melalui tabulasi data serta disajikan oleh peneliti dalam hasil dan pembahasan.

Menurut Moleong (2012: 337-338) yakni, bersifat *transferability* menggantikan validitas eksternal dan mendekati gagasan generalisasi berdasarkan teori. Maksudnya dalam konteks ini, penulis harus mengungkapkan secara khusus sekali segala sesuatu yang dibutuhkan oleh pembaca agar pembaca dapat memahami temuan-temuan yang diperoleh. Temuan penulis akan dikhususkan bagi situasi yang spesifik (artinya yang hanya berlangsung pada unit analisis penelitian). Proses *transferability* diawali pada tahapan penyusunan proposal, tepatnya ketika penulisan menguraikan karakteristik situasi yang menjadi pusat perhatian (*focal setting*), atau gambaran lokasi serta menunjukkan bagaimana sampel akan dipilih. Ketika penulis mampu mendiskusikan bagaimana temuan riset diposisikan, maka akan menimbulkan (*salience*), signifikansi, atau pentingnya riset akan muncul dengan sendirinya.

### 3. Kebergantungan

Kebergantungan merupakan substitusi realibilitas dalam penelitan nonkualitatif. Realibilitas merupakan syarat bagi validitas. Dalam penelitian kualitatif, uji kebergantungan dilakukan dengan pemeriksaan terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti tidak melakukan pemeriksaan terhadap keseluruhan proses penelitian di lapangan, tetapi bisa memberikan data. Peneliti ini perlu di uji *dependability*-nya. Maka peneliti mendiskusikannya dengan pembimbing

untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian.

#### 4. Kepastian

Menguji kepastian data berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang ada dalam penelitian. Derajat ini dapat dicapai melalui audit, atau pemeriksaan yang cermat oleh semua komponen dan proses penelitian serta hasil penelitian. Oleh karena itu, peneliti melakukan seminar terbuka atau tertutup yang dipandu oleh dosen pembimbing serta dosen pembahas.

## **IV. GAMBARAN UMUM PENELITIAN**

### **A. Gambaran Kota Bandar Lampung**

Gambaran umum Bandar Lampung terletak pada Kota Bandar Lampung merupakan sebuah kota yang menjadi ibukota Provinsi Lampung, Indonesia. Kota Bandar Lampung merupakan pintu gerbang pulau Sumatera, yang dimana penghubung jalur lintas dari pulau Jawa ke Sumatera dan sebaliknya dari Sumatera ke pulau Jawa. Kota ini terletak sekitar 165 km sebelah barat laut Kota Jakarta yang merupakan ibukota negara Indonesia.

Sebelumnya pada tanggal 18 Maret 1964 Provinsi Lampung merupakan keresidenan, dengan ditetapkannya peraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 1964 yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964. Keresidenan Lampung ditingkatkan menjadi Provinsi Lampung dengan Ibukotanya Tanjung Karang-Teluk Betung. Selanjutnya berdasarkan peraturan pemerintah No. 24 Tahun 1983 Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjung Karang-Teluk Betung diganti menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung terhitung sejak tanggal 1 Juni 1983 dan di tahun 1999 berubah menjadi Kota Bandar Lampung.

Dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1975 dan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1982 tentang perubahan wilayah, maka Kota Bandar Lampung diperluas dengan pemekaran dari 4 kecamatan 30 kelurahan menjadi 9

kecamatan 58 kelurahan. Kemudian berdasarkan SK (Surat Keputusan) Gubernur Nomor G/18.B.111/Hk/1988 tanggal 6 Juli 1988 serta surat keputusan Mendagri Nomor 140/199/PUOD tanggal 19 Mei 1987 tentang pemekaran kelurahan di wilayah Kota Bandar Lampung, maka Kota Bandar Lampung terdiri dari 9 kecamatan dan 84 kelurahan. Pada tahun 2001 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04, Kota Bandar Lampung terdiri dari 13 kecamatan dengan 98 kelurahan akan tetapi dari 13 kecamatan dan 98 kelurahan tersebut telah dimekarkan menjadi 20 kecamatan dan 126 kelurahan.

Kecamatan Bandar Lampung terdiri dari:

- |                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Tanjung Karang Pusat | 11. Sukarame       |
| 2. Tanjung Karang Timur | 12. Sukabumi       |
| 3. Tanjung Karang Barat | 13. Tanjung Karang |
| 4. Teluk Betung Selatan | 14. Labuhan Ratu   |
| 5. Teluk Betung Utara   | 15. Bumi Waras     |
| 6. Teluk Betung Barat   | 16. Enggal         |
| 7. Teluk Batang Timur   | 17. Langkapura     |
| 8. Raja Basa            | 18. Panjang        |
| 9. Kedaton              | 19. Kedamaian      |
| 10. Kemiling            | 20. Way Halim      |

## 1. Kondisi Geografis

Adapun secara Geografis wilayah Kota Bandar Lampung berada antara  $5^{\circ}20'$ - $5^{\circ}30'$ LS dan  $105^{\circ}28'$ - $105^{\circ}37'$ BT. Kota Bandar Lampung memiliki

luas wilayah 197,22 km<sup>2</sup>, yang terbagi kedalam 20 kecamatan dan 126 kelurahan dengan populasi penduduk 942.039 jiwa dengan kepadatan penduduk sekitar 4.777 jiwa/km<sup>2</sup> (BPS Kota bandar Lampung 2016). Dengan rata-rata pertumbuhan penduduk Kota Bandar Lampung pertahunnya 1,59%, maka diperkirakan jumlah penduduk Kota Bandar Lampung pada tahun 2030 akan berjumlah kurang lebih 1.610.149 jiwa, dan selain itu luas perairan di daerah Kota Bandar Lampung kurang lebih ±39,82 km<sup>2</sup> yang terdiri dari pulau kubur dan pulau pasaran. Selain itu, letak Kota Bandar Lampung tersebut berada di bagian selatan Provinsi Lampung (Teluk Lampung) dan ujung selatan Pulau Sumatera, dan sekitar 44,3% dari keseluruhan wilayah, merupakan wilayah perkotaan.

Secara administratif Kota Bandar Lampung berbatasan dengan beberapa wilayah Kabupaten di Provinsi Lampung, yaitu:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Lampung.
3. Sebelah Barat dengan Kecamatan Gedung Tataan dan Padang cermin Kabupaten Pesawaran.
4. Sebelah Timur dengan Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.

## **2. Kondisi Pendidikan**

Saat ini Kota Bandar Lampung merupakan pusat kegiatan pemerintahan, sosial, politik, jasa perdagangan, perekonomian, dan kebudayaan selain itu

juga merupakan pusat pendidikan di daerah Lampung. Kota Bandar Lampung memiliki sarana pendidikan mulai dari tingkat taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi, jenis yang disebutkan itu terdiri dari taman kanak-kanak, PAUD, Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah, dan yang terakhir Perguruan Tinggi mulai dari sekolah Negeri sampai Swasta, yang terdapat di Kota Bandar Lampung.

Adapun jumlah data satuan pendidikan (sekolah) di Kota Bandar Lampung, sebagai berikut:

Tabel 3. Daftar Jumlah Data Satuan Pendidikan (Sekolah) di Kota Bandar Lampung Tahun 2016

Jenis pendidikan	Status sekolah		Jumlah
	Negeri	Swasta	
PAUD/ TK	-	46	46
SD/ MI	207	114	321
SMP/MTs	36	122	158
SMA/MA	19	62	81
SMK	9	51	60

Sumber :Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung, Dapodik Tahun 2016

Dari daftar jumlah satuan pendidikan (sekolah) dasar, menengah, dan atas. Ada pula tingkat tertinggi pendidikan dimana disebut sebagai Perguruan Tinggi. Di Kota Bandar Lampung juga terdapat 46 Perguruan Tinggi dengan 6 Perguruan Tinggi Negeri, dan 40 Perguruan Tinggi Swasta yang termasuk di dalamnya (19 akademik, 16 sekolah tinggi, 1 institut, dan 5 universitas).

## B. Gambaran Singkat Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung

Adapun gambaran singkat Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung terletak di Jl. Amir Hamzah Gotong Royong Tanjung Karang Bandar Lampung.

Kantor Dinas Pendidikan dan Perpustakaan Kota Bandar Lampung yang dahulu disebut dengan kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Tanjung Karang Teluk Betung yaitu pada tahun 1976. Struktur organisasi pada saat itu sesuai dengan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0173/01/1983 tanggal 14 Maret 1983, dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0363/0/1988 tanggal 20 Juli 1988 tentang perubahan keputusan Mendikbud RI Nomor: 0304/0/1984 yaitu pasal 82 butir 14. Pada Tahun 1983, Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Tanjung Karang Barat Teluk Betung diubah menjadi Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kota Madya Daerah Tk II Bandar Lampung (lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 30, tambahan lembaran Negara Nomor 3254).

Kemudian pada tahun 1999 Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kota Madya Daerah Tingkat II Bandar Lampung diubah nama menjadi Kantor Departemen Pendidikan Nasional Kota Bandar Lampung Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan otonomi kepada daerah dengan didasarkan asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab antara lain mengundang konsekuensi adanya perubahan dasar dari sisi kelembagaan di daerah, maka dipandang perlu, menata susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan dan Perpustakaan Kota Bandar Lampung.

Pemberlakuan struktur organisasi Pendidikan dan Perpustakaan Kota Bandar Lampung tersebut sejak diterbitkannya Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2001 Tanggal 1 Januari 2001 tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Perpustakaan Kota Bandar Lampung setelah terbitnya keputusan Walikota tersebut di atas, maka terjadi perubahan nama kantor Departemen Pendidikan Nasional Kota Bandar Lampung berubah menjadi Kantor Dinas Pendidikan dan Perpustakaan Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor : 05 Tahun 2008 Tanggal 11 Februari 2008 Dinas Pendidikan dan Perpustakaan berubah menjadi Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung. Berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 88 Tahun 2012 Tanggal 11 September 2013 Pemekaran UPY Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung dari 13 UPTD menjadi 20 UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan. Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung juga terbagi dalam 20 Kantor Dinas Kecamatan atau UPTD di Bandar Lampung.



Gambar 2. Dokumentasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung Tahun 2016

## 1. Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung

### a. Visi

Visi Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung dirumuskan sebagai berikut:

“Terwujudnya pendidikan berkualitas dan terjangkau dengan dilandasi oleh

keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang menguasai IPTEK dan berdaya saing”. Maksudnyadari Visi pendidikan tersebut adalah upaya untuk menjadi yang unggul dan mengantarkan masyarakat Bandar Lampung untuk siap bersaing dalam menghadapi pasar bebas dengan sumber daya manusia yang dilandasi iman dan taqwa dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan meningkatkan kesejahteraan dan ketaqwaan masyarakat merupakan upaya menyeluruh (*comprehensive*) yang didukung pembangunan pendidikan dan kebudayaan sehingga pada akhirnya meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

b. Misi

Adapun Misi dari Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan perluasan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan.
- 2) Meningkatkan kualitas SDM yang menguasai IPTEK, unggul dan berstandar nasional atau internasional.
- 3) Meningkatkan kualitas pendidikan kejuruan yang memiliki keterampilan, unggul dan berdaya saing.
- 4) Mengembangkan jumlah lembaga pendidikan non formal dan formal.

## **2. Tujuan Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung**

Tujuan dari Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung merupakan penjabaran dan implementasi dari pernyataan visi dan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu (umumnya 1 sampai 5 tahun). Dengan adanya tujuan strategi ini Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi visi

dan misinya dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Sehingga dalam perumusan tujuan strateginya maka dapat memungkinkan pula untuk mengukur sejauh mana visi dan misi yang telah tercapai mengingat tujuan strategi dirumuskan berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung tersebut.

### **3. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung**

Adapun susunan Organisasi Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung sebagai berikut:

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pendidikan mempunyai tugas memimpin mengkoordinasikan dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan kebijakan yang diberikan oleh walikota.

b. Sekretaris, terdiri dari:

- 1) Sub Bagian Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi
- 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 3) Sub Bagian Keuangan

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang kesekretariatan. Sekretariat mempunyai fungsi pengelolaan urusan penyusunan program, monitoring dan evaluasi serta pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian, pengelola urusan keuangan.

c. Bidang Pendidikan Dasar terdiri dari:

- 1) Seksi TK, SD/MI, SDLB/SLB

- 2) Seksi SMP/M.Ts
  - 3) Seksi Pendidikan dan Tenaga Kerja Kependidikan Dasar
- d. Bidang Pendidikan Menengah
- 1) Seksi SMA/MA
  - 2) Seksi SMK
  - 3) Seksi Pendidikan Kerja Kependidikan Menengah
- e. Bidang Pendidikan Non Formal, dan Informal
- 1) Seksi Pendidikan Usia Dini
  - 2) Seksi Pendidikan Masyarakat
  - 3) Seksi Kesetaraan
- f. Bidang Gedung dan Perlengkapan
- 1) Seksi Perencanaan Teknis Gedung dan Perlengkapan
  - 2) Seksi Gedung
  - 3) Seksi Perlengkapan
- g. Unit Pelaksanaan Teknis
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

*Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung Tahun 2016*

## **C. Gambaran Umum SMK Arjuna Bandar Lampung**

### **1. Sejarah Singkat SMK Arjuna Bandar Lampung**

SMK Arjuna Bandar Lampung terletak di Jl. Tulang Bawang No. 35 Enggal Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung. SMK Arjuna Bandar Lampung juga merupakan sekolah yang menjadi salah satu bagian dari Yayasan Arjuna yang memiliki luas tanah 767 m<sup>2</sup>, dan waktu penyelenggaraan di pagi hari. Kemudian sekolah SMK Arjuna Bandar

Lampung berdiri pada Tahun 1996 dengan Surat Keputusan pendirian Nomor 190/I.12 b1 pada tanggal 2 Oktober 1996 dan masih berjalan hingga saat ini, berada di dekat pusat Kota Tanjung Karang, SMK Arjuna memiliki lokasi strategis yang sangat mudah diakses oleh warga sekolahnya. Letak Gedung SMK Arjuna Bandar Lampung yaitu di dalam lingkungan yayasan Arjuna adalah berada di sebelah kanan gedung SMA Arjuna Bandar Lampung, dan bersebelahan dengan SMP Arjuna Bandar Lampung atau bisa dikatakan lebih dekat dari jalan menuju arah perlintasan kereta api arah ke jalan Dr. Harun dimana terdapat pintu gerbang yang sangat mempermudah akses menuju ke arah ruang kantor SMK Arjuna Bandar Lampung.



Gambar 3. Dokumentasi SMK Arjuna Bandar Lampung Tahun 2017

Selain itu SMK Arjuna Bandar Lampung ini merupakan salah satu sekolah swasta yang ada di Kota Bandar Lampung dari sekian banyak sekolah swasta tingkat SMK yang ada di Bandar Lampung, dan SMK Arjuna Bandar Lampung jugamemiliki daya listrik yang berkekuatan 13.200 VA yang mana mampu untuk melengkapi jalannya proses kegiatan belajar yang ada di sekolah tersebut. Tidak hanya itu ada bidang keahlian, sarana prasarana, dan sumber daya manusia yang sangat penting untuk melengkapi kegiatan belajar mengajar di sekolah, seperti:

- a. Terdapat 2 Jurusan keahlian (Jurusan Akuntansi dan Jurusan Pemasaran).
- b. Terdapat 20 lokal ruang yang ada di SMK Arjuna Bandar Lampung, yang terdiri:
  1. Ada 8 ruang kelas yang terdiri dari:
    - a) Kelas X yaitu,(1 kelas jurusan Akuntansi, dan 1 kelas jurusan Pemasaran).
    - b) Kelas XI yaitu,(1 kelas jurusan Akuntansi, dan 1 kelas jurusan Pemasaran)
    - c) Kelas XII yaitu, (1 kelas jurusan Akuntansi, dan 1 kelas untuk jurusan Pemasaran), dan sisanya 2 lokal kelas tambah.
  2. Ada 1 ruang untuk lab komputer.
  3. Ada 1 ruang perpustakaan.
  4. Ada 2 ruang untuk kegiatan siswa (Osis, Pramuka, dan lainnya).
  5. Ada 4 sanitasi (1 kamar mandi guru perempuan, 1 kamar mandi guru laki-laki, 1 kamar mandi siswa, dan 1 kamar mandi siswi).
  6. Ada 4 ruang yang terdiri, ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang BK (Bimbingan Konseling), ruang Tata usaha.

Semua total lokal ruang yang ada berjumlah 20 ruang, dan terakhir terdapat sumber daya manusianya yang melengkapi jalannya proses pendidikan tersebut, yaitu:

1. Terdapat 17 guru pengajar yang terdiri (11 orang perempuan, dan 6 orang laki-laki), dan untuk status guru (12 guru honorer, dan 5 guru sertifikasi).
2. Ada 47 orang peserta didik yang terdiri (29 orang perempuan dan 18 orang laki-laki).

Adapun daftar peserta didik sesuai bidang dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 4. Daftar Peserta Didik yang Sesuai Tingkatan dan Bidang Keahlian

No.	Tingkatan	Bidang Keahlian/Jurusan	
		Kelas Akuntansi	Kelas Pemasaran
1.	Siswa Tingkat 10	7 Siswa/i	-
2.	Siswa Tingkat 11	12 Siswa/i	8 Siswa/i
3.	Siswa Tingkat 12	13 Siswa/i	7 Siswa/i

Sumber: SMK Arjuna Bandar Lampung Tahun 2017

## 2. Visi dan Misi SMK Arjuna Bandar Lampung

Adapun Visi dan Misi dari SMK Arjuna Bandar Lampung, sebagai berikut:

### a. Visi

Mempersiapkan tenaga kerja yang *religius*, profesional, mandiri dan bersaing. Maksud visi tersebut, merupakan upaya untuk mendorong peserta didik dalam mempersiapkan dirinya dalam menghadapi persaingan di dalam dunia pekerjaan, dan tetap memiliki sifat yang baik dalam segala hal, berperilaku profesional sehingga dalam menghadapi persaingan di lapangan kerja peserta didik dapat mampu menghadapinya.

### b. Misi

Adapun untuk mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui beberapa misi, misi SMK Arjuna Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

1. Membentuk peserta didik agar memiliki sikap dan perilaku yang terpuji sehingga menjadi manusia yang berakhlak mulia.
2. Menjadikan peserta didik yang siap bekerja.
3. Menjadikan peserta didik yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan berwirausaha.
4. Menciptakan tenaga kerja yang handal dan siap pakai.

### **3. Tujuan SMK Arjuna Bandar Lampung**

- a. Mempersiapkan tamatan yang memiliki kepribadian dan akhlak mulia sebagai tenaga kerja tingkat menengah yang kompeten sesuai program studi keahlian pilihannya.
- b. Membekali peserta didik untuk berkarir mandiri yang mampu beradaptasi di lingkungan kerja sesuai bidangnya dan mampu menghadapi perubahan yang terjadi masyarakat.
- c. Membekali peserta didik sikap profesional untuk mengembangkan diri dan mampu berkompetisi di tingkat nasional, regional dan internasional.

### **4. Struktur Organisasi SMK Arjuna Bandar Lampung**

Struktur organisasi SMK Arjuna Bandar Lampung sebagai berikut:

- a. Komite Sekolah SMK Arjuna Bandar Lampung
- b. Kepala Sekolah SMK Arjuna Bandar Lampung
- c. Wakil Kepala Sekolah Kurikulum
- d. Wakil Kepala Sekolah Humas
- e. Wakil Kepala Sekolah Sarana Prasarana
- f. Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan
- g. Kepala Tata Usaha
  1. Staf Tata Usaha
- h. Bendahara Sekolah
- i. Ketua Jurusan Akuntansi
- j. Ketua Jurusan Pemasaran

- k. Koordinator
- l. Koordinator BK/BP
- m. Kepala Pustakawan
- n. Wali kelas
- o. Peserta didik

*Sumber: SMK Arjuna Bandar Lampung Tahun 2017*

## **D. Gambaran Umum SMK Utama Bandar Lampung**

### **1. Sejarah Singkat SMK Utama Bandar Lampung**

SMK Utama Bandar Lampung terletak di Jl. Jend. Sudirman No. 39, Rawa Laut, Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung. SMK Utama Bandar Lampung merupakan sekolah yang menjadi salah satu bagian dari Yayasan Utama, yang mana SMK Utama Bandar Lampung termasuk sekolah yang berstatus swasta yang letaknya berada di Kota Bandar Lampung, dengan memiliki luas tanah 2000 m<sup>2</sup>. Yayasan Utama juga tidak hanya memiliki fasilitas pendidikan tingkat SMK, melainkan ada tingkat SMP, dan SMA. SMK Utama Bandar Lampung berdiri pada tahun 1989 dan Surat Keputusan pendirian sekolah dengan Nomor. 1190 pada tanggal 01 Januari 1990. SMK Utama Bandar Lampung yang berada di pusat kota tepatnya di Tanjung Karang Timur yang memiliki lokasi yang strategis dan mempermudah warga sekolah dalam mengakses pendidikan.

Letak gedung SMK Utama Bandar Lampung tepat di lantai dasar depan gedung yayasan utama adalah jalan Jend. Sudirman, selain itu disebelah kanan terdapat gedung SMA Negeri 1 Bandar Lampung dan di sebelah kiri terdapat toko yang menjual peralatan sekolah, keberadaan SMK Utama yang

masih di dalam lingkungan Yayasan Utama memang memiliki letak yang sangat strategis memudahkan warga sekolah menemukan SMK tersebut. Selain itu, SMK Utama Bandar Lampung memiliki luas tanah 2000 m<sup>2</sup> dengan waktu penyelenggaraan di pagi hari yang diikuti oleh peserta didiknya dalam sistem pembelajaran di kelas, dan yang terakhir SMK Utama Bandar Lampung memiliki daya listrik berkekuatan 22.000 VA untuk memenuhi kegiatan proses belajar siswa di sekolah tersebut.



Gambar 4 Dokumentasi SMK Utama 3 Bandar Lampung Tahun 2017

Tidak hanya itu saja, terdapat beberapa bidang keahlian/jurusan, sarana prasarana, dan sumber daya manusia yang sangat penting untuk melengkapi proses kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut, seperti:

- a. Adanya 4 Jurusan keahlian yaitu, (jurusan Administrasi Perkantoran, jurusan Akuntansi, jurusan Pemasaran, dan jurusan Teknik Komputer dan Jaringan)
- b. Terdapat 31 lokal ruang yang ada di SMK Arjuna Bandar Lampung, yang terdiri:
  - 1) Ada 13 ruang kelas yang terdiri dari:
    - a) Kelas X (1 kelas jurusan Administrasi Perkantoran, 1 kelas jurusan Akuntansi, dan 1 kelas jurusan Teknik Komputer Jaringan).

- b) Kelas XI (1 kelas jurusan Administrasi Perkantoran, 2 kelas jurusan Akuntansi, 1 kelas jurusan Pemasaran, dan 1 kelas jurusan Teknik Komputer Jaringan).
  - c) Kelas XII (2 kelas jurusan Administrasi Perkantoran, 1 kelas jurusan Akuntansi, 1 kelas jurusan Pemasaran, dan 1 kelas jurusan Teknik Komputer Jaringan).
- 2) Ada 1 ruang untuk lab komputer.
  - 3) Ada 1 ruang perpustakaan.
  - 4) Ada 2 ruang untuk kegiatan siswa (Osis, dan keterampilan).
  - 5) Ada 4 sanitasi (1 kamar mandi guru perempuan, 1 kamar mandi guru laki-laki, 1 kamar mandi siswa, dan 1 kamar mandi siswi).
  - 6) Ada 6 ruang yang terdiri, ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang BK (Bimbingan Konseling), ruang Tata usaha.
  - 7) Terdapat Ruang Ibadah, Ruang UKS, gudang, aula terbuka (ruang serba guna).

Adapun sumber daya manusianya yang melengkapi jalannya proses penyelenggaraan pendidikan tersebut, yaitu:

- 1) Terdapat 22 guru pengajar yang terdiri (10 orang perempuan, dan 12 orang laki-laki), dan untuk status guru (17 guru honorer, dan 5 guru sertifikasi).
- 2) Ada 283 orang peserta didik yang terdiri (169 orang perempuan dan 114 orang laki-laki).

Adapun daftar peserta didik yang sesuai bidang dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 5. Daftar Peserta Didik yang Sesuai Tingkatan dan Bidang Keahlian

No.	Tingkatan	Bidang Keahlian/Jurusan			
		Administrasi Perkantoran	Akuntansi	Pemasaran	Teknik Komputer Jaringan
1	Siswa Tingkat 10	23	21	-	40
2	Siswa Tingkat 11	25	40	10	20
3	Siswa Tingkat 12	44	25	9	26

Sumber: SMK Utama Bandar Lampung Tahun 2017

## 2. Visi dan Misi SMK Utama Bandar Lampung

Adapun visi dan misi SMK Utama Bandar Lampung yakni sebagai berikut:

### a. Visi

“Sekolah Kejuruan yang berwawasan kebangsaan multi etnis dan religius, taqwa dan ber’iman, demokratis dan tanggung jawab dalam wadah NKRI yang ber’azas pada Pancasila dan UUD 1945”.

Maksudnya, adalah SMK Utama Bandar Lampung berusaha membentuk SDM yang memiliki wawasan yang luas, keterampilan dan tetap bertanggung jawab dalam kondisi apapun, serta dilandasi iman dan taqwa sehingga mampu meningkatkan kualitas dalam menciptakan kesejahteraan dilingkungan masyarakat.

### b. Misi

Dalam mewujudkan visi tersebut harus ada yang ditempuh melalui misi, sebagai berikut, yaitu Mendidik dan mengharapakan generasi yang:

- 1) Beriman dan Taqwa kepada Tuhan.
- 2) Unggul dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- 3) Berwawasan kedepan yang multi dimensi.

### **3. Tujuan SMK Utama Bandar Lampung**

SMK Utama Bandar Lampung memiliki tujuan dalam menciptakan generasi muda yang berkualitas maka, SMK Utama Bandar Lampung yang merupakan salah satu lembaga pendidikan yang bertanggung jawab untuk menciptakan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, keterampilan dan keahlian, mampu menciptakan lulusan yang dapat mengembangkan kinerja apabila terjun dalam dunia kerja, dan dapat menciptakan sumber daya yang siap kerja, cerdas, kompetitif, dan profesional dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan.

### **4. Struktur Organisasi SMK Utama Bandar Lampung**

Struktur organisasi SMK Utama Bandar Lampung sebagai berikut:

- a. Komite Sekolah SMK Utama Bandar Lampung
- b. Kepala Sekolah SMK Utama Bandar Lampung
- c. Wakil Kepala Sekolah Kurikulum
- d. Wakil Kepala Sekolah Humas
- e. Wakil Kepala Sekolah Sarana Prasarana
- f. Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan
- g. Kepala Tata Usaha
  - 1) Staf Tata Usaha
- h. Bendahara Sekolah
- i. Ketua Jurusan Akuntansi
- j. Ketua Jurusan Administrasi Perkantoran

- k. Ketua Jurusan Pemasaran
- l. Ketua Jurusan Teknik Komputer Jaringan
- m. Koordinator
- n. Koordinator BK/BP
- o. Kepala Pustakawan
- p. Wali kelas
- q. Peserta didik

*Sumber: SMK Utama Bandar Lampung Tahun 2017*

## **VI. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa dampak program jalur bina lingkungan dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada SMK swasta di Kota Bandar Lampung tahun 2016 yang mana penelitian ini mengangkat studi kasusnya di SMK Arjuna Bandar Lampung dan SMK Utama Bandar Lampung.

1. Dampak positif terhadap program jalur bina lingkungan pada SMK Arjuna dan SMK Utama Bandar Lampung, yakni sebagai berikut:

1. Tim pengajar lebih cepat mengenal karakter siswa di kelas khusus di SMK Arjuna Bandar Lampung.
2. Meningkatnya kualitasinput SDM peserta didik baru Khusus di SMK Utama Bandar Lampung.
3. Sistem pembelajaran di kelas berjalan efektif di SMK Arjuna Bandar Lampung dan SMK Utama Bandar Lampung.
4. Efektifnya jumlah jam mengajar guru honorer dan guru insentif (sertifikasi) khusus SMK Utama Bandar Lampung.

2. Dampak negatif terhadap jalur bina lingkunganpada SMK Arjuna Bandar Lampung dan SMK Utama Bandar Lampung, yakni sebagai berikut:

- 1) Penurunan jumlah peserta didik baru yang di dapat SMK Arjuna Bandar Lampung dan SMK utama Bandar Lampung.
  - 2) Kurang efektifnya jumlah jam mengajar guru honorer dan guru insentif (sertifikasi) khusus di SMK Arjuna Bandar Lampung.
  - 3) Berkurangnya anggaran pendapatan dan bantuan sekolah di SMK Arjuna Bandar Lampung dan SMK Utama Bandar Lampung.
3. Hal yang tidak terpengaruh dengan adanya program jalur bina lingkungan yang ada di SMK Arjuna Bandar Lampung dan SMK Utama Bandar Lampung.
- 1) Semangat belajar pada peserta didik di kelas

Dalam hal ini, penyebab utamanya adalah menurunnya jumlah peserta didik baru yang didapat dan yang diterima masuk oleh sekolah-sekolah swasta di Kota Bandar Lampung. Sehingga mempengaruhi kualitas semangat belajar peserta didik di kelas, kurangnya jumlah jam mengajar guru honorer dan guru sertifikasi, dan berkurangnya pendapatan dan bantuan untuk sekolah tersebut.

## **B. Saran**

Berdasarkan dari hasil kesimpulan dan pembahasan yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti mencoba memberikan saran demi perbaikan dimasa-masa mendatang sebagai berikut:

1. Seharusnya pemerintah daerah, terkait penurunan jumlah peserta didik baru yang di dapat sekolah swasta, memberlakukan kebijakan program jalur bina lingkungan yang sama dan memberikan kuota jalur bina lingkungan untuk sekolah-sekolah swasta yang ada di Kota Bandar

Lampung khususnya SMK Arjuna Bandar Lampung dan SMK Utama Bandar Lampung.

2. Sebaiknya pemerintah daerah memberikan bantuan ke sekolah-sekolah swasta terkait jumlah jam mengajar guru yang kurang dengan memberikan hak untuk mengajar ke sekolah-sekolah negeri tingkat SMK di Kota Bandar Lampung, sehingga guru-guru swasta yang kekurangan jumlah jam mengajar di sekolah swasta dapat memenuhi jam mengajar 24jam/bulannya.
3. Sebaiknya pemerintah daerah memberikan sumbangan bantuan berupa dana hibah kepada sekolah-sekolah swasta di Kota Bandar Lampung yang terkena dampaknya terkait kekurangan peserta didik yang didapat. Sehingga sekolah-sekolah swasta seperti SMK Arjuna Bandar Lampung dan SMK Utama Bandar Lampung dapat meningkatkan dan memperbaiki kembali kualitas pendidikannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dunn, William N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Edisi Kedua). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Moleong, Lexy J. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nazir, M. 2009. Metode Penelitian. Bandung: Ghalia Indonesia.
- Persons, Wayne. 2005. Public Policy Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan. Jakarta: Kencana.
- Prihatin, Eka. 2011. Teori Administrasi Pendidikan. Bandung: Alfabeta.
- Subarsono, A.G. 2013. Analisis Kebijakan Publik (Konsep, teori, dan Aplikasi). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Subagyo, P. Joko. 2006. Metode Penelitian Dalam Teori Praktek. Jakarta: Rineka Cipta
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sulistio, Eko Budi. 2009. Buku Ajar Kebijakan Publik (Public Policy).
- Syafaruddin. 2008. Efektivitas Kebijakan Pendidikan (Konsep, straeitgi, dan aplikasi kebijakan menuju organisasi sekolah efektif). Jakarta : Rineka Cipta.
- Syahrizal D, Sugiarto Adi. 2013. Undang-Undang Sistem Pendidikan dan Aplikasinya. Jakarta Timur: Laskar Aksara.
- UUD 1945 Pasal 31 ayat 1-5 tentang pemerintah sebagai pihak yang memiliki kewenangan wajib memenuhi hak-hak warga negara.
- UU RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 49 Tahun 2013 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
- Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : 800/1202/IV.40/2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK Kota Bandar Lampung.
- Hariyati, Sinta. 2015. Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Jembatan Mahkota II Kota Samarinda vol.3, No. 2, Hal. 5 diakses pada 31 Oktober 2016 pukul 13.59 WIB <http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id>
- Nuh, MS. 2012. Hakikat Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Hal. 52 diakses tanggal 24 Oktober 2016 pukul 09.11 WIB <http://ejournal.undip.ac.id>
- MS. Enny, Rohmatin. 2015. Strategi Humas dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Peserta Didik SMK PGRI 1 Porong Sidoarjo Hal. 7 diakses pada 30 Oktober 2016 pukul 20.15 WIB <http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id>

Pratiknya. 2007. [Tesis] Pengembangan Kawasan Industri Dalam Meningkatkan Investasi di Kota Semarang. Hal.61 diakses pada 30 Oktober 2016 pukul 19.39 WIB <http://eprints.undip.ac.id>

-----KBBI. Kamus Besar Bahasa Indonesia. [Online]. Tersedia di: <http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>. Di akses 26 Oktober 2016

Sumber:<http://dinaspendidikanbdl.blogspot.co.id/p/sejarah.dinas.pendidikan.html>(diakses tanggal 20 Februari 2017)

Sumber: [https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Bandar\\_Lampung](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Bandar_Lampung) (diakses tanggal 17 Februari 2017)

Sumber:<http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/sekolah/>(diakses tanggal 20 Desember 2016)

Sumber:<http://lampungprov.go.id/page/detail/sejarah-lampung.html>(diakses tanggal 17 Februari 2017)

Sumber:<http://www.lampost.co/berita/pemkot-dinilai-langgar-perda-biling>(diakses tanggal 12 Agustus 2016)

Sumber:<http://www.lampung.tribunnews.com/program-biling-ancam-sekolah-swasta-97-sma-terancam-gulung-tikar> (diakses tanggal 13 Agustus 2016)